

Dr. Syamsul Bahri, M.Pd
Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd
Prof. Dr. R. Madhakomala, M.Pd



MODEL IMPLEMENTASI PROGRAM LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



MODEL IMPLEMENTASI PROGRAM LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Penulis:

Syamsul Bahri, Bedjo Sujanto, Madhakomala

Desain Cover:

Ridwan

Tata Letak:

Aji Abdullatif R

Editor:

Dr. Rudi Hartono, S.Ikom., M.Pd

ISBN:

978-623-6608-02-9

Cetakan Pertama:

Juli, 2020

Hak Cipta 2020, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2020

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI Jawa Barat

No.360/ALB/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: @penerbitwidina

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, Bapak Syamsul Bahri Mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta dapat menyelesaikan penyusunan buku Monograf yang berjudul “**MODEL IMPLEMENTASI PROGRAM LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**”. Buku Monograf ini diharapkan bisa menjadi tambahan referensi bagi para akademisi dan masyarakat pada umumnya dalam rangka menambah khazanah ilmu dan pengetahuan tentang Model Implementasi Program Lembaga Penjaminan Mutu, khususnya pada lembaga pendidikan tinggi. Terakhir, buku Monograf ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca, terutama bagi kalangan akademisi dan praktisi yang berkecimpung di lembaga pendidikan tinggi.

Jakarta, July 2020

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Rumusan	9
B. Tujuan	9
C. Metode	10
BAB 2 KONSEP EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM.....	13
A. Konsep Evaluasi	13
B. Konsep Implementasi Program	16
C. Tujuan dan Sasaran Evaluasi Program.....	19
D. Model-Model Evaluasi Program	20
BAB 3 PENJAMINAN MUTU	31
A. Pengertian Penjaminan Mutu	31
B. Pengertian Mutu Terpadu	36
C. Penjaminan mutu di STAI MU	38
D. Kebijakan Mutu	39
BAB 4 MODEL EVALUASI YANG DIGUNAKAN DALAM PENELITIAN	41
A. Evaluasi Program Model CIPP (Dikembangkan Oleh Stufflebeam)	41
B. Kelebihan dan Keterbatasan Evaluasi Dengan Model CIPP.....	44
C. Pelaksanaan Program Kerja Penjamin Mutu LPM	49
D. Capaian Hasil Pelaksanaan Program Penjamin Mutu LPM.....	51
E. Kesimpulan	54
DAFTAR PUSTAKA.....	59
PROFIL PENULIS	67

BAB 1

PENDAHULUAN

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) keberadaannya ditengah-tengah suatu masyarakat telah banyak memberikan kontribusi yang berarti, terutama dalam mengantarkan mahasiswanya menjadi insan yang berilmu pengetahuan Islam yang mumpuni dan trampil dalam mempraktekan serta berakhlak mulia. Lembaga ini dilihat dari sudut pandang organisasi merupakan salah satu lembaga di antara sekian banyak lembaga-lembaga pendidikan lainnya, juga merupakan lembaga resmi yang dilaksanakan secara manajemen.

Upaya untuk melakukan pengelolaan terhadap sumber daya yang ada dalam konteks manajemen guna peningkatan kualitas perkuliahan merupakan hal yang substantif, sebagai bagian dari kajian manajemen sekolah. Pengelolaan sumber daya yang dimaksud adalah melalui proses-proses perencanaan, pengorganisasian, penstafan, kepemimpinan, dan pengendalian. Terminologi ini tentunya perlu dilakukan adaptasi dengan pentahapan proses perkuliahan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi.

Keberlangsungan pendidikan saat ini sangat ditentukan oleh kondisi manajemen pendidikan yang diterapkan, sehingga membuahkan hasil sebagaimana harapan banyak orang. Fakta yang terjadi, saat ini sejumlah lembaga pendidikan masih belum menerapkan manajemen yang ideal dalam kelangsungan pendidikan. Melainkan dalam pelaksanaannya masih menggunakan pendekatan yang bersifat konvensional, yang pada akhirnya

tidak dapat mengikuti lajunya perkembangan zaman yang begitu cepat saat ini, bahkan terkesan konservatif dan tradisional.

Fakta menunjukkan bahwa hambatan utama dalam pengembangan pendidikan bukan semata-mata pada aspek keuangan melainkan bertumpu pada aspek manajemen. Oleh karena itu dalam memperbaiki mutu pendidikan harus dimulai dari perbaikan manajemen pendidikan. Sejalan dengan itu manajemen tentunya merupakan kekuatan utama dalam organisasi untuk mengatur atau mengkoordinasikan kegiatan sub-sub system dan menghubungkannya dengan lingkungan. Manajemen juga merupakan suatu proses dimana sumber-sumber yang semula tidak berhubungan satu dengan yang lainnya lalu ditegaskan menjadi suatu system menyeluruh untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Senada dengan hal ini Yanling Jin mempertegas bahwa: *“Educational management system developers and designers in the actual work process in-depth educational administration should fully take into account the system's effectiveness, practicality, science and rasionality”* (Jin, 2014). Dimana Sistem manajemen pendidikan, oleh para pengembang dan perencana sesungguhnya dalam proses kerja menurut administrasi pendidikan yang mendalam sepenuhnya memperhitungkan keefektifan, kepraktisan sistem secara sains dan rasional.

Untuk mewujudkan STAI MU Tanjungpinang sebagaimana harapan seluruh unsur yang terlibat dalam persaingan yang kompetitif diantara perguruan tinggi yang ada di Tanjungpinang, baik perguruan tinggi swasta maupun negeri, membuat STAI MU Tanjungpinang termotivasi untuk menata diri mulai dari ketua Yayasan, ketua STAI, staf administrasi, dosen, mahasiswa, orangtua dan masyarakat melakukan tindakan cerdas melalui strategi kebijakan mutu dan program kerja lembaga mutu yang diharapkan memenuhi standar sebagaimana tuntutan sekolah masa depan. Untuk mewujudkan cita-cita mulia pendidikan, diperlukan sistem perkuliahan yang representatif, yaitu sistem yang mampu mengelola mahasiswa mulai dari input, proses, dan output berbasis pemenuhan kebutuhan dan pengembangan potensi setiap unsur yang terdapat di dalam diri manusia. Apabila kebutuhan-kebutuhan manusia dapat terpenuhi, baik kebutuhan jasmani, akal, ruh maupun kebutuhan berinteraksi, maka akan tercipta keseimbangan yang akan berdampak pada

kebahagiaan dan kedamaian. Dilihat dari sisi agama, keseimbangan yang sempurna merupakan tujuan hakiki pendidikan Islam.

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 353 Tahun 2004, tujuan dimana pendidikan tinggi agama Islam (PTAI) adalah terwujudnya lulusan yang akan menjadi anggota masyarakat dan warga negara yang beriman, ber-taqwa, berakhlak mulia, memiliki pemahaman yang terpadu antara ilmu dan agama, berkepribadian Indonesia, bahkan memperoleh kompetensi akademik dan profesionalitas tinggi dalam mewujudkan, menumbuh-kembangkan dan menciptakan pengetahuan, teknologi serta kesenian, di bidang ilmu agama yang diintegrasikan dengan ilmu lainnya.

Perguruan Tinggi beserta lingkungannya di manapun berada, sedang mengalami perubahan yang sangat cepat. Secara global perubahan terlihat dalam bentuk berkembangnya masyarakat informasi yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Penguasaan ilmu pengetahuan oleh individu dan organisasi akan menjadi prasyarat dan modal dasar bagi upaya pengembangan diri dan organisasi dalam situasi yang makin kompetitif. Setiap orang dan organisasi terpaksa bahkan dipaksa untuk selalu memperbaharui pengetahuan dan keterampilan jika ingin tetap hidup dan berkembang. Keadaan yang demikian disebabkan oleh cepatnya perubahan kebutuhan kompetensi perorangan maupun organisasi dalam dunia yang penuh perubahan dan persaingan. Kondisi yang demikian memerlukan respon proaktif dari seluruh lapisan masyarakat, terlebih-lebih lagi di lingkup Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul 'Ulum Tanjung-pinang.

Tuntutan masyarakat terhadap dunia pendidikan, lembaga pendidikan yang lulusannya mudah mendapat pekerjaan sangat diminati. Hal ini bukan sesuatu yang salah bahkan sangat rasional. Lembaga pendidikan perlu mensikapinya dengan tepat, sebab pertimbangan masyarakat bertumpu pada dimensi sekarang dan kekinian dengan lingkup parsial, sedangkan lembaga pendidikan mesti mempertimbangkan juga dimensi kenantian, sehingga lebih bersifat holistik. Kondisi ini sangat perlu diantisipasi lebih awal oleh organisasi pendidikan, khususnya perguruan tinggi baik yang dimiliki pemerintah maupun swasta. Masyarakat akan semakin kritis memilih perguruan tinggi yang diinginkan, dengan pertimbangan, bahwa apakah setelah lulus akan mudah mendapatkan

pekerjaan yang layak. Kondisi semacam ini menjadi acuan suatu perguruan tinggi untuk lebih meningkatkan mutu pengelolaannya agar tujuan perguruan tinggi yang telah direncanakan dapat terwujud (Khoiri, Tinggi, & Nuklir-Batan, 2009). Lebih tegas Nik Mutasim dan kawan-kawan menyimpulkan bahwa Islamic human resource management dalam organisasi akan dapat berkembang dengan baik apabila didukung oleh employees trust (Nik Mutasim Nik Ab. Rahman, Mohamad Adnan Alias, Sharmin Shahid, Mohamad Abdul Hamid, & Syed Shah Alam, 2013).

Perguruan Tinggi menjadi pelopor dalam pembinaan dan pengembangan Sumberdaya manusia yang terintegrasi guna memenuhi (1) kebutuhan warga masyarakat yang berorientasi ideal atas pendidikan, melalui penciptaan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya spirit akademik yang dinamis, serta dapat menjadi wahana sosialisasi nilai-nilai, norma, dan sikap mandiri, dan (2) kebutuhan masyarakat yang berorientasi pragmatis melalui kesiapan mendidik manusia yang dapat terserap oleh dunia usaha sesuai spesifikasinya masing-masing. Pengembangan sumberdaya manusia dimaksud dapat diemban oleh Perguruan Tinggi Umum maupun Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015).

PTAI tidak hanya dituntut mencetak alumni yang cerdas dari aspek intelektual, tetapi juga mencakup kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Keseimbangan yang proporsional di antara ketiga aspek itu menjadi salah satu kekuatan PTAI dalam membina mahasiswanya. Selain itu, manusia cerdas yang dikembangkan di lingkungan PTAI tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi juga menunaikan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat dan sebagai bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia yang memiliki kepribadiannya sendiri.

Salah satu misi PTAI adalah mengembangkan integrasi keilmuan. Sarjana PTAI yang mendalami program studi agama diberi mata kuliah penunjang yang memadai. Demikian pula sebaliknya, mahasiswa yang mendalami prodi umum diberi mata kuliah agama yang memadai. Pertimbangan ini dipandang penting agar sarjana yang dihasilkan oleh PTAI mampu memahami teks-teks agama secara mendalam dengan wawasan yang luas.

Upaya pencapaian tujuan Pendidikan Tinggi selalu dihadapkan berbagai masalah. Problem utama yang sedang menimpa sekolah tinggi saat ini merupakan masalah mutu dan relevansi sebagaimana diharapkan. Sebahagian besar pendidikan tinggi saat ini belum mampu mewujudkan mahasiswanya sebagai enterpreneur yang dapat menciptakan lapangan kerja agar bisa mandiri. Oleh sebab itu, "bagi para pemilik dan pengelola Perguruan Tinggi, sistem manajemen mutu pada hakekatnya berinti pada perbaikan terus menerus untuk memperkuat dan mengembangkan mutu lulusan sehingga dapat diserap oleh kalangan instansi dan pasar tenaga kerja". "Kualitas ternyata berkaitan dengan sejumlah karakteristik, sehingga banyak yang kurang dapat terukur secara objektif, mengingat tugas menilai terhadap kualitas pendidikan sangat rumit" (Asmawi, 2018) (Haseena, V.A; Mohammed, 2015).

Beberapa masalah penting yang dihadapi oleh dunia pendidikan tinggi saat ini, khususnya Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) MU Tanjungpinang yaitu: pertama, masih rendahnya kualitas pendidik atau tenaga dosen. Masalah ini sangat penting yang harus segera di temukan solusinya, mengingat berpengaruh besar terhadap kelulusan, terutama dalam pembentukan indek pembangunan manusianya (IPM). Tanjungpinang yang terkesan masih perlu ditingkatkan. Kedua, belum memadainya fasilitas pendidikan. Dengan sarana pendidikan yang masih minim ber-pengaruh besar terhadap kelangsungan pembelajaran, sehingga kelulusan sebagaimana harapan tidak maksimal. Ketiga, masalah efektivitas pen-didikan. Sumber daya manusia sangat menentukan efektivitas pem-belajaran di institusi pendidikan tinggi. Namun kenyataannya, bahwa di STAI Tanjungpinang, hingga kini penyelenggaraan pendidikannya masih belum efektif. Keempat, mahalanya biaya pendidikan. Sebagaimana di-ketahui bersama, dimana masyarakat semakin terbebani dengan biaya yang tidak sedikit, pada akhirnya hanya masyarakat yang tergolong mampu yang dapat menguliahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dampak akhir dari kenyataan permasalahan pendidikan tinggi tersebut adalah ketidakadilan dalam memperoleh hak atas pendidikan.

Masalah kelima yaitu pengangguran terdidik. Pengangguran terdidik terkait dengan kualitas pendidikan tinggi. Sejumlah pendidikan tinggi dimana lulusannya masih belum dapat diterima dunia kerja, apalagi

menciptakan lapangan kerja sendiri, merupakan problem tersendiri bagi perguruan tinggi pada umumnya di Indonesia. Faktanya di Indonesia terus terjadi peningkatan pengangguran terdidik pada tahun-tahun terakhir, sementara jumlah penganggur tidak terdidik makin turun. Masalah keenam, *link and match* antara kebutuhan sumberdaya manusia pada pendidikan tinggi dalam dunia kerja. Pendidikan tinggi diharapkan berjalan sebagaimana mestinya, sementara fakta lapangan jarang mendapat perhatian secara intensif. Sehingga keberadaan pendidikan tinggi kurang berfungsi dalam pembentukan masyarakat yang sejahtera. Pendidikan tinggi pada dasarnya belum berhasil dalam membentuk sumberdaya manusia yang siap di tempatkan di dunia kerja yang tersedia dan pendidikan tinggi juga belum mampu menghasilkan entrepreneur yang memiliki keberanian dan kemandirian. *Scientific research must be relevant and responsive to society's intellectual and practical needs. This dual goal seems to be out of sight and often out of consideration for most academic institutions in the region* (Guessoum & Osama, 2015). Untuk meningkatkan sains, institusi pendidikan tinggi harus memberi siswa pendidikan yang luas dan menjadi meritokratis

Lembaga pendidikan Tinggi Islam di Indonesia juga masih menghadapi masalah seperti permasalahan PT pada umumnya sebagaimana uraian terdahulu. Permasalahan pertama yang dihadapi yaitu kelemahan sumber daya manusia (SDM), manajemen mutu maupun dana. Sementara itu, diketahui bahwa jika suatu lembaga pendidikan ingin tetap eksis secara fungsional di tengah-tengah arus kehidupan yang makin kompetitif seperti sekarang ini, dan ini harus didukung oleh tiga hal, yaitu: SDM, manajemen mutu dan dana (Welch, 2012).

Manajemen mutu PTAI adalah sebuah sistem kompleks yang terdiri banyak elemen yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Memandang dunia pendidikan PTAI tidak bisa dilihat hanya dari satu segi, tetapi harus multi perspektif. Di satu sisi, banyak harapan masyarakat terhadap dunia pendidikan PTAI, karena merupakan faktor vital bagi kemajuan masyarakat. Tetapi, di sisi lain, banyak sekali masalah yang dihadapi dunia pendidikan PTAI, sehingga harapan-harapan ideal masyarakat sering kali hanyalah harapan yang tidak terwujud. Oleh karena pendidikan merupakan sebuah sistem yang kompleks, kompleksitas dan kerumitan yang ada pada

dunia pendidikan PTAI harus dilihat dari elemen yang ada dalam dunia pendidikan pada setiap tingkatan atau level.

Tantangan penting yang dihadapi oleh Pendidikan Tinggi Islam adalah bagaimana mengelola sebuah lembaga pendidikan yang bermutu tinggi. Mutu PT memiliki peran sentral dalam upaya peningkatan sumber daya manusia yang bermutu. Kemajuan pendidikan di Indonesia dilihat dari sudut kuantitas cukup baik, sementara perkembangan mutu belum tumbuh secara merata. Pendidikan bermutu merupakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang sesuai dengan harapan masyarakat, baik dalam kualitas pribadi, moral, pengetahuan maupun kompetensi kerja menjadi syarat mutlak dalam kehidupan masyarakat global yang terus berkembang saat ini dan yang akan datang.

Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum (STAI MU) merupakan lembaga pendidikan tinggi Islam yang telah lama ada di Tanjungpinang. STAI MU dapat dikatakan Lembaga PT dan PTAIS tertua di Tanjungpinang. STAI MU di bawah Yayasan Pondok Pesantren Terpadu Miftahul Ulum telah berdiri sejak Tahun 1991. Alumni STAI MU tersebar di seluruh wilayah Kepulauan Riau maupun di luar Kepulauan Riau.

Kiprah STAI MU Tanjungpinang dalam mendidik dan meningkatkan sumberdaya manusia masyarakat kepri tidak dapat diabaikan. Sumberdaya manusia terutama dosen bidang Pendidikan Agama Islam (PAI) telah banyak diluluskan. Alumni STAI MU juga banyak menempati atau bertugas di lembaga swasta maupun pemerintah yang tidak terkait dengan tugas guru PAI.

Perkembangan STAI MU Tanjungpinang dari tahun 1991 saat berdirinya hingga sekarang mengalami pasang surut. Perkembangan lembaga, sumberdaya, konteks lingkungan, dosen, mahasiswa, mutu lulusan dan pengelolaan juga mengalami banyak dinamika yang khas untuk STAI MU. Perkembangan yang paling penting menjadi tinjauan adalah perkembangan kebijakan mutu melalui perogram kerja lembaga penjaminan mutu semenjak berdiri hingga saat ini. Perkembangan mutu suatu Sekolah Tinggi Agama Islam merupakan perkembangan kehidupan Sekolah tinggi yang diharapkan dapat terwujud dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama.

STAI MU sebagai suatu lembaga pendidikan tinggi swasta yang ada di Tanjungpinang, tentunya turut menghadapi perubahan global. Sehingga melalui kebijakan pemerintah maupun konteks keberadaannya di lingkungan masyarakat mengalami banyak tantangan sekaligus peluang. Peluang dan tantangan dimaksud dalam rangka perkembangan mutu STAI MU tergantung karakteristik yang dimiliki oleh STAI MU Tanjungpinang itu sendiri. Perkembangan ini, menurut peneliti khususnya dalam kerangka perbaikan manajemen mutu dimasa mendatang menjadi sesuatu sangat menarik untuk diteliti melalui evaluasi implementasi kebijakan mutu dan program kerja penjaminan mutu. Merujuk pada UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pasal 57 ayat (1), evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Depdiknas, 2003). Sehingga penjaminan mutu di Perguruan Tinggi (*Quality Assurance*) sesuatu yang tidak dapat diabaikan oleh Perguruan Tinggi khususnya Sekolah Tinggi Agama Islam. STAI MU Tanjungpinang dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan keberadaannya, yaitu: memuat ketentuan umum tentang standar penjaminan mutu. Ada pun standar mutu yang dijadikan rujukan, berdasarkan Manual Kebijakan Mutu dan Program Kerja Lembaga Penjaminan Mutu STAI MU diidentifikasi dalam 15 kategorisasi antara lain:

1. pembinaan Iman dan taqwa,
2. pengelolaan Lembaga,
3. pengembangan kurikulum,
4. proses perkuliahan,
5. Penciptaan Suasana Akademik,
6. pembinaan kemahasiswaan,
7. kompetensi lulusan,
8. dosen dan tenaga kependidikan,
9. pembiayaan,
10. sarana-perasarana,
11. sistem informasi dan promosi,
12. penelitian dan publikasi ilmiah,
13. pengabdian dan pemberdayaan masyarakat,
14. kerjasama dalam dan luar negeri,

15. evaluasi kinerja.

A. RUMUSAN

Permasalahan utama diuraikan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimaimana dasar hukum, tujuan, sasaran dan strategi program kerja LPM STAI MU Tanjungpinang?
2. Bagaimana sarana-prasarana, anggaran, monitoring, pimpinan, dosen dan staf, program kerja LPM di STAI MU Tanjungpinang?
3. Bagaimana pelaksanaan program kerja LPM STAI MU Tanjungpinang?
4. Bagaimana capaian hasil pelaksanaan program kerja LPM STAI MU Tanjungpinang?

B. TUJUAN

Penelitian ini terfokus pada evaluasi implementasi kebijakan mutu dan program kerja LPM STAI MU Tanjungpinang. Berdasarkan fokus penelitian tersebut dimana tujuan umum penelitian adalah mengungkap implementasi kebijakan mutu dan program kerja lembaga penjaminan mutu (LPM) STAI MU Tanjungpinang dengan cara meninjau konteks lingkungan, masukan, proses, dan produk. Cara ini dilakukan dengan mengumpulkan dokumen akademik penjaminan mutu, strategi implementasi terkait tujuan yang akan dicapai.

Tujuan umum penelitian adalah untuk memperbaiki implementasi kebijakan mutu dan program Kerja LPM di STAI MU Tanjungpinang. Dari tujuan umum tersebut maka diuraikan beberapa tujuan khusus antara lain untuk:

1. Memperbaiki landasan dasar hukum, tujuan, sasaran dan strategi program kerja LPM STAI MU Tanjungpinang.
2. Memperbaiki kebijakan pengadaan sarana-prasarana, serta meningkatkan anggaran dan monitoring, pimpinan, dosen dan staf LPM di STAI MU Tanjungpinang.
3. Meningkatkan proses implementasi kebijakan dan kinerja LPM STAI MU Tanjungpinang.
4. Meningkatkan hasil implementasi kebijakan mutu dan kinerja LPM STAI MU Tanjungpinang.

C. METODE

Pendekatan, metode dan disain penelitian

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian evaluasi dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan model CIPP melalui tahapan konteks, masukan, proses, dan produk. Penelitian evaluasi merupakan suatu penelitian yang menerapkan proses inkuiri untuk mengumpulkan dan mesintesa kesimpulan dengan meninjau kriteria yang ditetapkan terhadap aspek empiris maupun normatif tentang mutu program atau sejenisnya, dan bagaimana cara pencapaiannya (Mertens, 2010). Peninjauan tersebut kemudian dilanjutkan dengan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pada kegagalan dan keberhasilan implementasi kebijakan mutu dan program kerja LPM di STAI MU Tanjungpinang.

Peneliti dalam penelitiannya langsung ke lapangan dan berupaya mengumpulkan data secara lengkap sesuai dengan pokok permasalahan yang berhubungan dengan fokus masalah. Data dihimpun sesuai fokus penelitian berupa kata-kata, tindakan, situasi, dokumentasi, dan peristiwa yang diobservasi (Scott, D & Usher, 2011).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode evaluatif. Guna melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan mutu dan program kerja lembaga penjaminan mutu. Implementasi kebijakan mutu dan program kerja lembaga penjaminan mutu diungkap secara mendalam melalui tahapan konteks, masukan, proses, dan produk. Evaluasi dimaksud sebagai salah satu bentuk penelitian yang akan dilaksanakan.

Di antara perbedaan penelitian evaluasi dan penelitian yang lain adalah berupa tujuan guna pengambilan keputusan yang didasarkan pada tolak ukur yang memiliki kriteria tertentu. Sasaran yang akan diperoleh terhadap suatu program yang akan diimplementasikan melalui komponen program berupa kualitas terbaik sebagaimana harapan setiap komponen hendaknya menggunakan tolak ukur/standar yang jelas (Wholey, Hatry, & Newcomer, 2010).

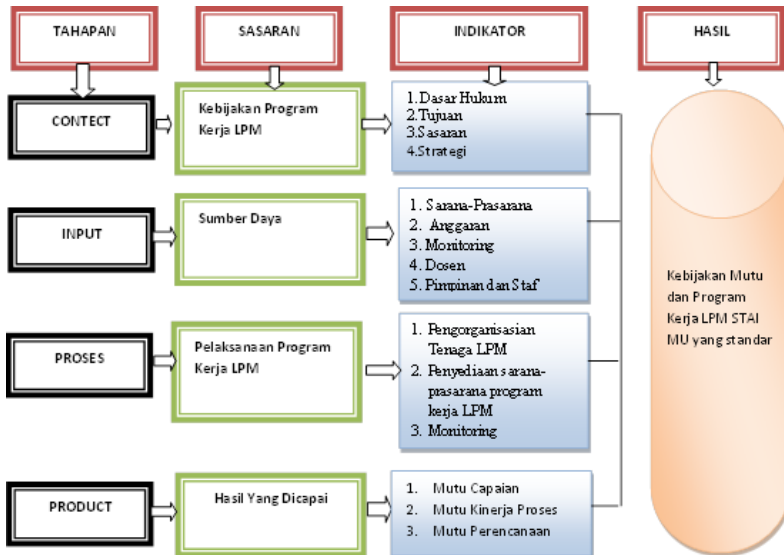
CIPP yang digunakan pada penelitian ini adalah model yang diperkirakan mampu menguraikan secara mendalam yang terdapat pada pelaksanaan program pada tahapan program kebijakan mutu,

3. Desain Model Penelitian

Proses evaluasi program pada penelitian ini melalui beberapa tahap yaitu: tahap persiapan, pengumpulan data, pengecekan data, analisis data, dan kesimpulan. Aktivitas evaluasi model CIPP Implementasi Kebijakan Mutu dan Program Kerja Lembaga Penjaminan Mutu STAI MU Tanjungpinang dengan 4 tahapan (Wildschut, 2014) yang terintegrasi pada masing-masing komponennya yaitu:

- a. Evaluasi Konteks, maksudnya adalah evaluasi terhadap dasar hukum, tujuan, sasaran dan strategi dalam pemenuhan karakteristik dari setiap aspek-aspek penting dalam hal penilaian tentang kebijakan mutu dan program kerja lembaga penjaminan mutu yang dijadikan acuan STAI MU Tanjungpinang untuk mewujudkan visi-misinya. Sebagai evaluator seharusnya mampu memprioritaskan kebutuhan dan dapat menentukan tujuan yang terkait dengan keberhasilan program.
- b. Evaluasi Masukan, sebagai pertimbangan kemampuan dan kondisi awal yang dimiliki oleh institusi untuk melaksanakan sebuah program.
- c. Evaluasi Proses, diarahkan seberapa mungkin program yang dikerjakan dapat terlaksana menurut rencana.
- d. Evaluasi Hasil, adalah tahapan akhir dari pekerjaan evaluasi yang mengukur seberapa mungkin tujuan dapat tercapai, apakah proses berjalan sebagaimana pencapaian tujuan, dan kesesuaian tindakan yang diberikan, serta akibat/dampak dari program.

Adapun desain evaluasi dalam penelitian implementasi kebijakan mutu dan program kerja lembaga penjaminan mutu STAI-MU Tanjungpinang, dapat dilihat pada Gambar 1 berikut:



Gambar 1: Desain Evaluasi Implementasi Manajemen Mutu dan Program Kerja Penjaminan Mutu STAI MU (diambil dari Stufflebeam, 1971:30 dan disesuaikan dengan fokus penelitian) (Wildschut, 2014)

Tahapan evaluasi implementasi kebijakan mutu dan program kerja LPM di STAI MU Tanjungpinang oleh peneliti dilakukan di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau. Keadaan konteks dapat sangat berpengaruh terhadap perkembangan manajemen mutu STAI. Product penelitian ini diharapkan layak dijadikan referensi, tentang implementasi kebijakan mutu dan program kerja LPM di STAI MU Tanjungpinang wilayah-wilayah kepulauan lainya di Indonesia.

BAB 2

KONSEP EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM

A. KONSEP EVALUASI

Kata evaluasi berasal dari “*evaluation*”. Kata tersebut diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi evaluasi. Penilaian merupakan kata benda dari nilai. Pengukuran mengacu kepada tindakan membandingkan sesuatu dengan satuan ukuran tertentu, sehingga sifatnya dapat menjadi kualitatif atau kuantitatif. Definisi evaluasi yang dituliskan oleh Suharsimi adalah: *to find out, decide the amount or value* (Suharsimi Arikunto, 2010). Makna definisi tersebut yaitu suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah. Khandker et.al menyatakan: *In contrast, evaluation is a systematic and objective assessment of the results achieved by the program. In other words, evaluation seeks to prove that changes in targets are due only to the specific policies undertaken* (Khandker, R. Shahidur., Koolwal, B. Gayatri., Samad, 2010). Memperbandingkan antara tujuan yang hendak dicapai terhadap penyelesaian masalah, dengan kejadian yang sebenarnya, merupakan analisa akhir yang dijadikan pertimbangan apakah suatu program harus direvisi atau dilanjutkan.

Stufflebeam dan Coryn memperjelas bahwa “evaluation is a process for giving attestation to such matters as reliability, effectiveness, cost-effectiveness, efficiency, safety, ease of use, and probity” (Coryn, 2014). Evaluasi dalam hal ini berfungsi sebagai suatu proses penyediaan

informasi pertimbangan dalam menentukan harga dan jasa terhadap tujuan yang ingin dicapai, desain, implementasi dan dampak dalam membuat keputusan, dan bertanggungjawab dalam meningkatkan pemahaman terhadap fenomena. Lebih lanjut beliau menegaskan bahwa: *Evaluation is the systematic assessment of the worth or merit of an object* (Coryn, 2014).

Evaluasi dalam konteks profesional digunakan dalam upaya pengambilan keputusan untuk leadaan kompleks dan merupakan metode praktis sebagaimana pendapat Stavropoulou & Stroubouki yang menyatakan bahwa *“Evaluation is used in various professional contexts on a daily basis in order to make decisions for complex matters that require individuals or methods of practice to be either certified, secured or improved”* (Stavropoulou & Stroubouki, 2014).

Istilah evaluasi secara umum dapat disamakan dengan penaksiran, pemberi angka dan penilaian. Proses pengukuran dan perbandingan daripada hasil pekerjaan yang dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya (Postlethwaite, 2005). Hal yang penting diperhatikan dalam definisi tersebut yaitu:

1. Penilaian merupakan fungsi organik karena pelaksanaan fungsi tersebut menentukan keberlangsungan suatu oraganisasi.
2. Penilaian itu adalah suatu proses yang berarti bahwa penilaian adalah kegiatan yang terus menerus dilakukan oleh adminitrasi dan manajemen.
3. Penilaian menunjukkan jurang pemisah antara hasil pelaksanaan yang sesungguhnya dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai (Stavropoulou & Stroubouki, 2014).

Hakikatnya evaluasi dapat dipahami bahwa kegiatan evaluasi merupakan tindakan mengukur, menilai, dan membandingkan hasil-hasil yang telah dicapai dengan hasil-hasil yang sebelumnya telah direncanakan. Evaluasi juga merupakan suatu kegiatan yang selalu dilakukan dalam suatu organisasi dan evaluasi merupakan salah satu fungsi dari suatu proses manajemen serta tidak dapat diabaikan begitu saja. Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi tentang nilai atau manfaat suatu kebijakan maupun program. Hasil yang diharapkan dari suatu evaluasi yaitu

pengetahuan yang relevan dengan kebijakan atau program yang sedang berlaku.

Model evaluasi adalah desain evaluasi yang dibuat oleh para ahli/pakar evaluasi yang biasa diberi nama sama dengan pembuatnya. Model ini dianggap model standar. Ahli evaluasi yang membagi evaluasi sesuai dengan misi yang akan dibawakan serta kepentingan atau penekanan atau dapat juga disebut sesuai dengan paham yang dianut yang disebut pendekatan atau *approach*.

Kegiatan evaluasi harus dilakukan secara hati-hati, bertanggung jawab, serta menggunakan strategi dapat dipertanggung jawabkan. Evaluasi merupakan proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Tayipnapis, mengklasifikasi evaluasi secara lebih rinci yang mempunyai dua kegunaan, yaitu fungsi formatif dan fungsi sumatif (Tayib Nafis, 2008). Fungsi evaluasi secara formatif, digunakan untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan yang sedang berjalan (program, orang, produk, dsb). Fungsi evaluasi secara sumatif, digunakan untuk pertanggungjawaban, keterangan, seleksi atau lanjutan. Evaluasi semestinya membantu pengembangan, implementasi, kebutuhan suatu program, perbaikan program, pertanggungjawaban, seleksi, motivasi, menambah pengetahuan dan dukungan dari pihak yang terlibat (Heather Fry, Hethaer., Ketteridge, Steve., Marshall, 2009).

Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Tanpa evaluasi, maka tidak akan diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut dalam rancangan, pelaksanaan serta hasilnya. Evaluasi juga dapat dipahami secara berbeda-beda sesuai dengan pengertian evaluasi yang bervariasi oleh para ahli. Djaali dan Pudji, menjelaskan bahwa: evaluasi dapat juga diartikan sebagai "proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas obyek yang dievaluasi (Pudji, 2008) (Amanchukwu et al., 2015). Samuel & John, mengartikan evaluasi sebagai "*an integral part of the multi-faceted process of enhancing quality and attaining excellence*" (Peng & Li, 2009). Evaluasi bukan sekadar menilai suatu aktivitas secara spontan dan insidental, tetapi juga merupakan

kegiatan untuk menilai sesuatu secara terencana, sistematis, dan terarah berdasarkan tujuan yang jelas. Evaluasi dapat diartikan sebagai suatu proses yang ditempuh seseorang untuk memperoleh informasi yang berguna untuk menentukan mana dari dua hal atau lebih yang merupakan alternatif yang diinginkan. Penentuan atau keputusan semacam ini tidak diambil secara acak, maka alternatif-alternatif itu harus diberi nilai relatif. Pemberian nilai itu harus memerlukan pertimbangan yang rasional berdasarkan informasi untuk proses pengambilan keputusan. Pengertian evaluasi tersebut dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah kegiatan mengumpulkan informasi tentang hasil kerja. Hasil kerja selanjutnya digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan.

Program adalah rangkaian kegiatan sebagai perwujudan dari suatu kebijakan. Wujud dari hasil evaluasi program adalah rekomendasi dari evaluator untuk mengambil keputusan. Terdapat 4 kemungkinan dalam mengambil kebijakan pelaksanaan program keputusan, yaitu: menghentikan program; merevisi program; melanjutkan program; menyebarkan program (melaksanakan program di tempat-tempat lain atau mengulangi lagi program di lain waktu).

B. KONSEP IMPLEMENTASI PROGRAM

Program merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaannya. Evaluasi terhadap suatu program sangat dipengaruhi oleh berbagai hal yang terkait, baik kualitas masukan, kualitas proses, maupun kualitas hasil pelaksanaan. Hal ini mengacu pada asumsi bahwa pembelajaran merupakan sistem yang terdiri atas beberapa unsur, yaitu masukan, proses dan keluaran/hasil.

Program merupakan sarana yang berfungsi dalam pencapaian tujuan. Charles O. Jones, membagi kedalam tiga kategori aktivitas dalam pengoperasian program yaitu:

1. Pengorganisasian, struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program, sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.

2. Interpretasi, Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.
3. Penerapan atau Aplikasi, Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya (Jones, 1996).

Salah satu model implementasi program yakni model yang diungkapkan oleh David C. Korten. Model ini memakai pendekatan proses pembelajaran dan lebih dikenal dengan model kesesuaian implementasi program.

Model kesesuaian Korten digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Model kesesuaian Korten
 Sumber: (David C. Korten.1988: 11)

Korten menggambarkan model ini berintikan tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program. Korten menyatakan bahwa suatu

program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program (Korten & Syahrir, 1988).

Pola yang dikembangkan Korten, dapat dipahami bahwa kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan kalau tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsur implementasi program. Hal ini disebabkan apabila output program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, jelas output tidak dapat dimanfaatkan. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang disyaratkan oleh program, maka organisasinya tidak dapat menyampaikan output program dengan tepat. Syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran, maka kelompok sasaran tidak mendapatkan output program. Kesesuaian antara tiga unsur implementasi program mutlak diperlukan agar program berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Meninjau landasan dan mutu implementasi, dapat disimpulkan bahwa: proses implementasi program telah berjalan dengan baik dengan memperhatikan, beberapa hal penting sebagai berikut: 1) unit pelaksana teknis telah disiapkan; 2) pelaksana program telah mengerti akan rencana, tujuan, dan sasaran serta strategi program; 3) aktor-aktor utama telah ditetapkan dan siap menerima tanggung jawab pelaksanaan program tersebut; 4) koordinasi pelaksanaan telah dilakukan dengan baik; 5) hak dan kewajiban, kekuasaan dan tanggung jawab telah diberikan serta dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh pelaksana program; 6) kriteria penilaian keberhasilan pelaksanaan program telah ada, jelas, dan diterapkan dengan baik.

Hal dimaksud dijadikan bahan dan pedoman dalam proses pencarian data pertimbangan di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Miftahun 'Ulum dalam upaya mendeskripsikan pelaksanaan program kerja lembaga penjaminan mutu. Kesimpulannya, program merupakan interpretasi dari sebuah kebijakan bagi institusi resmi maupun swasta, atau organisasi yang berisi kumpulan instruksi yang dibuat untuk memperbaiki permasalahan yang sedang dilaksanakan. Program harus ada dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Yang dimaksud dalam fokus kajian penelitian ini adalah Evaluasi kebijakan mutu program Kerja lembaga penjaminan mutu di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Miftahul 'Ulum.

C. TUJUAN DAN SASARAN EVALUASI PROGRAM

Tujuan dari evaluasi program secara umum adalah tujuan yang diarahkan pada program secara keseluruhan dan secara khusus tujuan adalah tujuan yang diarahkan pada masing-masing komponen. Pelaksanaan evaluasi program dituntut untuk mampu mengenali komponen-komponen program. Penentuan sasaran evaluasi, maka evaluator perlu mengenali program dengan baik, terutama komponen-komponennya. Sasaran evaluator diarahkan pada komponen agar pengamatannya dapat lebih cermat dan data yang dikumpulkan lebih lengkap pula.

Evaluator harus memiliki kemampuan mengidentifikasi komponen program yang akan dievaluasi. Kaitan antara tujuan program dengan tujuan evaluasi program. Evaluasi Program dilakukan dengan cara yang sama dengan penelitian. Evaluasi program tersebut adalah penelitian yang mempunyai ciri khusus yaitu melihat keterlaksanaan program sebagai pelaksanaan program sebagai realisasi kebijakan untuk menentukan tindak lanjut dari program tersebut. Kesimpulan penelitian diikuti dengan saran, sehingga evaluasi program selalu harus mengarah pada pengambilan keputusan yang diakhiri dengan menghasilkan rekomendasi dalam pengambilan keputusan. Evaluasi program selalu diarahkan kepada perolehan rekomendasi sehingga tujuan evaluasi program tidak boleh terlepas dari tujuan program yang akan dievaluasi. Keduanya selalu terkait karena tujuan program ini merupakan dasar untuk merumuskan tujuan evaluasi program. Secara singkat dapat dibuat sebuah ketentuan bahwa tujuan

evaluasi program harus dirumuskan dengan titik tolak tujuan program yang dievaluasi.

Setiap kegiatan yang dilaksanakan pasti mempunyai tujuan, demikian juga dengan evaluasi. Menurut Arikunto, ada dua tujuan evaluasi yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diarahkan kepada program secara keseluruhan, sedangkan tujuan khusus lebih difokuskan pada masing-masing komponen (Arikunto, 2007). Tujuan dan atau fungsi evaluasi menurut Crawford adalah untuk: mengetahui apakah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai dalam kegiatan; memberikan objektivitas pengamatan terhadap perilaku hasil, mengetahui kemampuan dan menentukan kelayakan; memberikan umpan balik bagi kegiatan yang dilakukan (Crawford, 2005). Tujuan akhir evaluasi adalah untuk memberikan bahan-bahan pertimbangan dalam menentukan/membuat kebijakan tertentu, yang diawali dengan suatu proses pengumpulan data yang sistematis.

D. MODEL-MODEL EVALUASI PROGRAM

Evaluasi berasal dari kata "*evaluation*" yang bermakna penilaian. Evaluasi adalah proses penilaian. Penilaian ini bisa menjadi netral, positif atau negatif atau bahkan merupakan gabungan dari keduanya. Evaluasi biasanya dilakukan oleh pihak yang mengevaluasi dalam rangka mengambil keputusan tentang nilai atau manfaatnya.

Model evaluasi adalah model desain evaluasi yang dibuat oleh para ahli/pakar evaluasi yang biasa dinamakan sama dengan pembuatnya. Model ini dianggap model standar. Ahli evaluasi membagi jenis atau model evaluasi sesuai dengan misi yang akan dibawakan serta kepentingan atau sesuai dengan paham yang dianut sebagai suatu pendekatan atau *approach*.

Ahli evaluasi program yang dikenal sebagai pencetus/perancang model evaluasi program di antaranya yaitu Stufflebeam, *Metfessel*, *Michael Scriven*, *Taylor*, *Stake Glaser*. Kaufmann dan Thomas. Ahli evaluasi memformulasi model evaluasi menjadi delapan yaitu: 1) Model evaluasi *Goal oriented evaluation* model, dari *Taylor*; 2) Model *evaluasi Goal Free Evaluation* Model, dari *Michael Scriven*; 3) Model *evaluasi Formatif Summatif Evaluation* Model juga dari *Michael Scriven*; 4) Model evaluasi

Countenance Evaluation Model, dari Stake; 5) Model evaluasi *Resposive Evaluation Model*, juga dari Stake; 6) *Model evaluasi CSE-UCLA Evaluation Model*, dari Alkin; 7) Model evaluasi *Discreapancy Model*, oleh Provus; dan 8) Model devaluasi *CIPP Evaluation Model*, dikembangkan oleh *Stufflebeam* (Arikunto, 2007).

Penjelasan dari masing-masing model evaluasi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Model evaluasi Goal Oriented Evaluation Model (dikembangkan oleh Tyler).

Model ini merupakan model yang muncul paling awal. Obyek pada model ini adalah tujuan program yang sudah ditetapkan jauh sebelum program dimulai. Evaluasi dilakukan secara berkelanjutan, terus-menerus, memeriksa sejauh mana tujuan tersebut sudah terlaksana dalam proses pelaksanaan program.

Model evaluasi ini secara umum memberikan penekanan terhadap produktivitas dan akuntabilitas dalam suatu aktivitas. Model dimaksud juga sering dipergunakan untuk mengukur pencapaian dan kemajuan proses belajar mahasiswa. Penilaian harus menilai tingkah laku mahasiswa (peserta didik), pada perubahan tingkah laku yang dikehendaki dalam pendidikan. Evaluasi mesti dibuat di akhir program.

Langkah pertama dalam model ini adalah mengenali tujuan suatu program. Setelah tujuan program diketahui, indikator-indikator pencapaian tujuan dan alat pengukuran diketahui pasti. Hasil kajian dibandingkan dengan tujuan program dan keputusan dibuat berdasarkan tingkat pencapaian yang diperoleh. Menurut Tyler, apabila tujuan program tidak tercapai sepenuhnya, ini membawa akibat program pembelajaran lemah atau tujuan yang dipilih tidak sesuai.

2. Model evaluasi Goal Free Evaluation Model (dikembangkan oleh Michael Scriven)

Model yang dikembangkan Michael Scriven tahun 1972 ini dapat dikatakan berlawanan dengan model awal yang dikembangkan oleh Tyler. Model awal yang dikembangkan oleh Tyler, evaluator terus-menerus memantau tujuan, yaitu sejak awal proses terus melihat sejauh mana

tujuan tersebut sudah tercapai. Model goal free evaluation (evaluasi lepas dari tujuan) justru meninjau pada tujuan.

Pelaksanaan evaluasi program oleh evaluator tanpa memperhatikan apa yang menjadi tujuan program. Yang penting untuk diperhatikan dalam program tersebut adalah bagaimana kerja programnya. Tindakan ini dilakukan dengan jalan mengidentifikasi penampilan-penampilan yang terjadi, baik hal-hal yang positif (yaitu hal yang diharapkan) maupun hal-hal negatif (yang sebetulnya memang tidak diharapkan).

Tujuan program tidak perlu diperhatikan karena ada kemungkinan evaluator terlalu rinci mengamati setiap tujuan khusus. Bila tiap tujuan khusus tercapai, artinya terpenuhi dalam penampilan, tetapi evaluator lupa memperhatikan sejauh mana masing-masing penampilan tersebut mendukung penampilan akhir yang diharapkan oleh tujuan umum maka akibatnya jumlah penampilan khusus ini tidak banyak manfaatnya.

Uraian ini jelas menyatakan bahwa dimaksud dengan “evaluasi lepas dari tujuan” dalam model ini bukannya lepas sama sekali dari tujuan tetapi hanya lepas dari tujuan khusus. Model ini hanya mempertimbangkan tujuan umum yang akan dicapai oleh program, bukan secara rinci untuk setiap komponen.

3. Model evaluasi *Formatif Summatif Evaluation Model* (dikembangkan oleh Michael Scriven)

Michael Scriven juga mengembangkan model formatif-sumatif. Model ini merujuk adanya tahapan dan lingkup objek yang dievaluasi. Evaluasi dilakukan pada waktu program masih berjalan (disebut evaluasi formatif) dan ketika program sudah selesai ataupun berakhir (disebut evaluasi sumatif). Model ini berbeda dengan yang pertama dikembangkan, model yang kedua ini ketika melaksanakan evaluasi, evaluator tidak dapat melepaskan diri dari tujuan. Tujuan evaluasi formatif berbeda dengan tujuan summatif, sehingga model yang dikemukakan oleh Michael Scriven ini menunjuk tentang “apa, kapan, dan tujuan” evaluasi dilaksanakan.

Para evaluator pendidikan, termasuk guru-guru yang mempunyai tugas evaluasi, tentu sudah mengenal dengan baik apa yang dimaksud dengan evaluasi formatif dan sumatif. Guru-guru hampir setiap bulan melakukan evaluasi formatif dalam bentuk ulangan harian. Evaluasi

tersebut dilaksanakan dalam upaya mengetahui sampai seberapa tinggi tingkat keberhasilan atau ketercapaian tujuan untuk masing masing pokok pembahasan oleh siswa. Luas atau sempitnya materi yang tercakup di dalam pokok bahasan setiap mata pelajaran tidak sama maka tidak dapat ditentukan dengan pasti kapan evaluasi formatif dilaksanakan dan berapa kali untuk masing-masing mata pelajaran.

Evaluasi formatif merupakan evaluasi yang dilaksanakan ketika program masih berlangsung atau ketika program masih dekat dengan permulaan kegiatan. Tujuan evaluasi formatif yaitu untuk mengetahui sejauh mana program yang dirancang dapat berlangsung, sekaligus mengidentifikasi hambatan. Hambatan dan hal-hal yang menyebabkan program tidak lancar yang terungkap, oleh pengambil keputusan secara dini dapat mengadakan perbaikan yang mendukung kelancaran pen-capaian tujuan program.

Evaluasi sumatif dilakukan setelah program berakhir. Tujuan dari evaluasi sumatif untuk mengukur ketercapaian program. Fungsi evaluasi sumatif dalam evaluasi program pembelajaran dimaksudkan sebagai sarana mengungkap posisi atau kedudukan individu di dalam kelompoknya. Objek sasaran dan waktu pelaksanaan berbeda antara evaluasi formatif dan sumatif, oleh sebab itu lingkup sasaran yang dievaluasi juga beda.

4. Model evaluasi *Countenance Evaluation Model* (dikembangkan oleh Stake)

Model *Countenance Evaluation Model* dikembangkan oleh Stake. Ulasan tambahan oleh Fernandes 1984, dalam Arikunto, model Stake menekankan pada adanya pelaksanaan dua hal pokok, yaitu 1) deskripsi (*description*) dan 2) pertimbangan (*judgements*). Model ini juga membedakan adanya tiga tahapan dalam evaluasi program, yaitu (1) *antecedents* (*antecedents/context*), (2) transaksi (*transaction/process*), dan (3) keluaran (*output-autocomes*) (Arikunto, Suharsimi dan Abdul Jabar, 2009).

Tiga hal yang dituliskan menunjukan objek atau sasaran evaluasi. Setiap program yang dievaluasi, evaluator harus mampu mengidentifikasi tiga hal, yaitu (1) antesenden yang diartikan sebagai konteks, (2) transaksi yang diartikan sebagai proses, dan (3) outcome yang diartikan sebagai hasil.

Kedua matriks yang digambarkan sebagai deskripsi dan pertimbangan, menunjukkan langkah-langkah yang terjadi selama proses evaluasi.

Matriks pertama, yaitu deskripsi, berkaitan atau menyangkut dua hal yang menunjukkan posisi sesuatu (yang menjadi sasaran evaluasi). Dua sasaran evaluasi dimaksud yaitu apa maksud tujuan yang diharapkan oleh program, dan pengamatan akibat, atau apa yang sesungguhnya terjadi atau apa yang benar-benar terjadi. Evaluator mengikuti matriks kedua untuk kelanjutannya, yang menunjukan langkah pertimbangan, yang dalam langkah tersebut mengacu pada standar. Stake (1967), menyatakan ketika evaluator tengah mempertimbangkan program pendidikan, mereka harus melakukan dua perbandingan yaitu, (1) membandingkan kondisi hasil evaluasi program tertentu dengan yang terjadi di program lain, dengan objek sasaran yang sama; (2) membandingkan kondisi hasil pelaksanaan program dengan standart program yang bersangkutan, didasarkan pada tujuan yang akan dicapai (Arikunto, Suharsimi dan Abdul Jabar, 2009). Analisis proses evaluasi yang dikemukakan Stake 1967, dalam Tayibnapis membawa dampak yang cukup besar dan meletakkan dasar sederhana namun merupakan konsep yang cukup kuat untuk perkembangan yang lebih jauh dalam bidang evaluasi (Tayipnapis, 2008).

Penekanan dalam model ini adalah bahwa evaluator yang membuat penilaian tentang program yang dievaluasi. Stake menyatakan bahwa description di satu pihak berbeda dengan judgement atau menilai. Model ini memuat, *antecedesments* (masukan), *transaction* (proses), dan *out-comes* (hasil) data dibandingkan tidak hanya untuk menentukan perbedaan tujuan dengan keadaan yang sebenarnya. Model juga dibandingkan dengan standar yang absolut, untuk menilai manfaat program. Stake selanjutnya menyatakan bahwa tak ada penelitian dapat diandalkan apabila tidak dinilai.

5. Model evaluasi *Responsive Evaluation Model* (dikembangkan oleh Stake)

Model evaluasi ini oleh Stake, didefinisikan evaluasi sebagai suatu nilai pengamatan dibandingkan dengan keahlian. Stakes (1967 dalam Azizi, 2008), telah menggariskan beberapa ciri pendekatan model evaluasi responsif yaitu; 1) cenderung kearah aktivitas program (proses) daripada

tujuan program; 2) mempunyai hubungan dengan banyak kalangan untuk mendapatkan hasil evaluasi dan; 3) perbedaan nilai perspektif dari banyak individu menjadi ukuran dalam melaporkan kegagalan dan keberhasilan suatu program.

Pendekatan sistem dalam model ini adalah mengorbankan beberapa fakta dalam evaluasi. Harapannya dapat meningkatkan penggunaan hasil evaluasi kepada individu atau program itu sendiri. Lebih banyak evaluator fokus menekankan pada kenyataan, penggunaan ujian objektif, menentukan standar program dan laporan penyelidikan. Model evaluasi ini kurang memberikan pengaruh dalam komunikasi formal dibandingkan dengan komunikasi biasa.

Model ini berdasarkan pada yang biasa individu lakukan untuk menilai suatu masalah. Pelaksanakan evaluasi dengan model ini, evaluator harus bekerja lebih keras untuk memastikan individu yang dipilih memahami apa yang perlu dilakukan. Evaluator juga perlu membuat prosedur yang standar dalam mencari serta mengatur tim untuk memperhatikan pelaksanaan program tersebut. Evaluator melalui bantuan tim akan menyediakan catatan, deskripsi, hasil tujuan serta membuat grafik. Evaluator juga menilai kualitas dan catatan orang yang membantu evaluasi. Model ini memiliki empat tahapan dalam metode ini: 1) Awal pelaksanaan evaluasi, evaluator dan klien (*stakeholder*) membuat perundingan tentang kontrak mengenai tujuan penilaian, validitas dan jaminan kerahasiaan. *Stakeholder* di sini adalah individu yang terlibat dalam evaluasi tersebut dan memiliki hak untuk memberikan ijin dan isu-isu yang berkaitan dengan proses evaluasi. 2) Dilanjutkan mengenal pasti concern (perhatian), isu dan nilai nilai dari *stakeholder*. Fakta-fakta diperoleh melalui temu wawancara dan kuisisioner. 3) tahap ketiga mengumpulkan informasi yang memiliki hubungan dengan tujuan, isu, nilai yang dikenal pasti oleh *stakeholder*. Evaluator berdasarkan data dan informasi secara deskriptif tentang perkara yang dievaluasi dan standar yang digunakan untuk membuat pertimbangan, diakhiri dengan 4) Penyediaan laporan mengenai keputusan atau pilihan-pilihan. Format kajian kasus sering digunakan untuk membuat laporan ini mengandung beberapa isi-isu dan perhatian yang dikenal oleh *stakeholder*.

6. Model Evaluasi *CSE-UCLA Evaluation Model* (Dikembangkan Oleh Alkin)

CSE-UCLA merupakan dua singkatan, yaitu CSE dan UCLA. CSE merupakan singkatan dari *Center for the Study of Evaluation*, sedangkan UCLA merupakan singkatan dari *University of California in Los Angeles*. Ciri model CSE-UCLA adalah adanya lima tahap yang dilakukan dalam evaluasi, yaitu perencanaan, pengembangan, implementasi, hasil, dan dampak. Fernandes (1984), dalam Arikunto (2004) menjelaskan tentang model CSE-UCLA menjadi 4 tahap, 1) CSE Model: *Needs Assessment*. Tahap ini evaluator memusatkan perhatian pada penentuan masalah. Pertanyaan yang diajukan tentang: a) Hal-hal apakah yang perlu dipertimbangkan sehubungan dengan keberadaan program, b) Kebutuhan apakah yang terpenuhi sehubungan dengan adanya pelaksanaan program ini, c) Tujuan jangka panjang apakah yang dapat dicapai melalui program ini, 2) CSE Model: *Program Planning*. Dalam tahap kedua dari CSE Model ini evaluator mengumpulkan data yang terkait langsung dengan pembelajaran dan mengarah pada penentuan kebutuhan yang telah diidentifikasi pada tahap pertama. Dalam tahap perencanaan ini program PMB di evaluasi dengan cermat untuk mengetahui apakah rencana pembelajaran telah disusun berdasarkan analisis kebutuhan. Evaluasi tahap ini tidak lepas dari tujuan yang telah dirumuskan. 3) CSE Model: *Formative Evaluation*. Tahap ketiga ini evaluator memusatkan perhatian pada keterlaksanaan program. Evaluator diharapkan betul-betul terlibat dalam program karena harus mengumpulkan data dan sebagian informasi dari pengembangan program. 4) CSE Model: *Summative Evaluation* (Arikunto, Suharsimi dan Abdul Jabar, 2009). Tahap keempat ini, yaitu evaluasi summatif, para evaluator diharap dapat mengumpulkan semua data tentang hasil dan dampak dari program. Melalui evaluasi sumatif ini, diharapkan dapat diketahui apakah tujuan yang dirumuskan untuk program sudah tercapai, dan jika belum, dicari mana yang belum dan apa penyebabnya.

7. Model Evaluasi Kesenjangan (*Discrepancy*)

Provus menyatakan evaluasi adalah untuk membangun dan afirmatif, tidak untuk menghakimi. Model Evaluasi "*Discrepancy*" Kesenjangan

(Provus 1971 dalam Nyre & Rose, 1979) adalah suatu model evaluasi program yang menekankan pentingnya pemahaman sistem sebelum evaluasi. Kapan saja dapat mengevaluasi sesuatu, dan evaluasi ditekankan pada pemahaman tepat dan jelas atas hal yang dievaluasi, untuk menetapkan standar.

Model ini merupakan suatu prosedur penyelesaian masalah untuk mengidentifikasi kelemahan (termasuk dalam pemilihan standar) dan untuk mengambil tindakan korektif. Kasus suatu sistem yang kompleks seperti suatu proyek, obyek evaluasi berupa sesuatu yang belum jelas dan sukar untuk dipahami. Klarifikasi obyek evaluasi sangat dibutuhkan untuk membuat evaluasi terlaksana.

Model ini memuat proses evaluasi pada langkah-langkah dan isi kategori sebagai cara memfasilitasi perbandingan capaian program dengan standar. Pada saat yang sama mengidentifikasi standar untuk digunakan untuk perbandingan di masa depan. Argumentasi Provus, bahwa semua program memiliki daur hidup (*life cycle*).

Landasan tindakan mengevaluasi adalah patokan atau standar yang telah ditentukan. Evaluasi pendidikan (hasil belajar) standarnya bisa hanya berupa benar atau salah. Misalnya mengerjakan soal Matematika, jika murid bisa menjawab benar sekian persen dari soal, maka dikatakanlah bahwa pendidikan (pengajaran dan kegiatan belajar murid) gagal atau berhasil. Keberhasilan atau kegagalan itu pun pakai standar pula, misalnya 75% sudah dianggap berhasil. Indonesia dalam hal ini, sekarang digunakan istilah KKM (kriteria ketuntasan minimal). Maksud dari kriteria (patriokan, standar) untuk menentukan apakah murid sudah “tuntas” menguasai materi pelajaran (*mastery*) dengan menetapkan “batas minimal” sekian persen dari keseluruhan materi yang diajarkan/dipelajari. Standar ini pada saat melakukan evaluasi program memang menjadi bahan perdebatan, karena tidak mudah menetapkannya, tetapi harus ditetapkan terlebih dahulu.

Discrepancy adalah ketidaksesuaian (bukan kesenjangan, atau perbedaan memang perbedaan, tetapi maknanya beda). Yang dimaksudkan adalah ketidaksesuaian, ketidakselarasan antara dua hal yang seharusnya, idealnya, harapannya, sama. (*“A Discrepancy exists between things which*

ought to be the same”). Sinonimnya *“incongruity, disagreement, discordance, contrariety, variance.”*

Objek sasaran evaluasi program dalam lembaga pendidikan, misalnya, dengan menggunakan model *discrepancy Provus* itu ada lima aspek (kadang ada yang menyebutnya empat), (Nyre & Rose, 1979; Wildschut, 2014) yaitu sebagai berikut.

1. Tahap Design (rancangan; program design) adalah rancangan kegiatan atau program kerja. Ada yang menyebutnya dengan definisi program (penetapan program). Yang dievaluasi adalah ada tidaknya unsur masukan, proses, dan keluaran (sesuatu itu lahan, personil, sarana prasarana, sumber daya sekarang berkeadaan seperti apa, mau diproses dengan cara bagaimana, agar menjadi seperti apa). “Diteliti-evaluasi” kemudian kekomprehensifkan dan konsistensi (keselarasan) internal rancangan tersebut.
2. Tahap Installation (program installation; penyediaan perangkat-perengkapan yang dibutuhkan program). Agar program bisa dilaksanakan, lembaga pembuat program itu tentu harus menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk mendukungnya. Evaluasi dilakukan terhadap ketepatan berbagai sumber daya, perangkat dan perlengkapan yang tersedia untuk pelaksanaan program. Misalnya, jika diprogramkan meningkatkan kemampuan mahasiswa mengajar, apakah sudah “disiapkan” tempat latihan mengajar yang baik.
3. Tahap *Process* (program *process*) adalah proses pelaksanaan program. Tahap ini termasuk kepemimpinan dan penugasan-penugasan (*instruction*). Evaluasi tahap ini tentang keterkaitan antara sesuatu yang akan diubah, dibangun, dikembangkan dsb, dengan kegiatan (proses) untuk mengubah, membangun, mengembangkannya. Misalnya, jika diharapkan sekian orang staf bisa studi lanjut, maka proses yang berkaitan adalah “menyiapkan” mereka untuk bisa studi lanjut, meningkatkan kemampuan bahasa *Ingggris*, meningkatkan penguasaan metodologi penelitian dan penulisan karya ilmiah, bukan “menugaskan studi lanjut.”
4. Tahap *product* (program *product*, hasil program). Evaluasi terhadap efektivitas desain atau rancangan program; tegasnya apakah tujuan atau target program bisa tercapai.

5. *Tahap Cost* (biaya, pengeluaran) tentang implikasi (kemanfaatan) sosial politik ekonomi apa yang diharapkan bisa tergapai dari pelaksanaan program (Nyre, Glenn F. and Rose, 1979).

Tahap *design, focus* kegiatan dilakukan untuk merumuskan tujuan, proses atau aktifitas, serta pengalokasian sumberdaya dan partisipan dalam melakukan aktivitas dan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Program pendidikan menurut Provus merupakan sistem dinamis yang meliputi masukan (*antecedent*), proses, dan keluaran (juga *outcomes*). Standar atau harapan-harapan yang ingin dicapai ditentukan untuk masing-masing komponen tersebut. Standar ini merupakan tujuan program yang kemudian menjadi kriteria dalam kegiatan evaluasi, khususnya penilaian yang dilakukan.

BAB 3

PENJAMINAN MUTU

A. PENGERTIAN PENJAMINAN MUTU

Mutu memiliki kualitas yang berbeda tergantung siapa yang menggunakannya. Orang yang berbeda akan menilai dengan kriteria yang berlainan pula. Kualitas pelayanan pada hakikatnya merupakan keunggulan layanan yang diberikan seseorang kepada orang lain sesuai dengan standar tertentu. Para ahli sudah mencoba mendefinisikan dari sudut pandang masing-masing.

Definisi lain *"Quality means those features of products which meet customer needs and thereby provide customer satisfaction"* (Juran, Godfrey, Hoogstoel, & Schilling, 1998). Deming bermaksud bahwa: mutu merupakan kesesuaian antara kebutuhan pasar dan konsumen. Perusahaan yang bermutu ialah perusahaan yang menguasai pangsa pasar karena hasil produksinya sesuai dengan kebutuhan konsumen, sehingga menimbulkan kepuasan bagi konsumen. Jika konsumen merasa puas, maka mereka akan setia dalam membeli produk perusahaan tersebut baik berupa barang maupun jasa.

Crosby mengatakan *"Quality means, conformance to requirements"* (Suarez, 2000). Mutu bukan penyelesaian cepat untuk mengatasi masalah manajemen, karena ia bukanlah sebuah program, melainkan sebuah transformasi. Ahli mutu Amerika dari Balkan Juran cit suarez *"defines quality as fitness for use. He stresses a balance between product features and products free from deficiencies"* (Suarez, 2000). Juran membahas arti

dan manfaat mutu bagi pelanggan sangat penting bagi manajer yaitu sebagai keistimewaan produk, semakin istimewa semakin tinggi mutunya, selanjutnya mutu bebas dari kekurangan (*defesiensi*) yaitu semakin sedikit kekurangan, semakin baik mutunya.

Gerald Suarez melanjutkan *"Quality is conformance to the requirement: All the actions necessary to run an organization, produce a product and or service, and deal with customers must be met and agreed"* (Suarez, 2000). Menurutnya kualitas harus didefinisikan dalam istilah terukur dan jelas dinyatakan untuk membantu organisasi mengambil tindakan berdasarkan target nyata, bukan pada sekelompok, pengalaman atau pendapat.

Goetsch dan Davis, menyatakan *Quality is a dynamic state associated with products, services, people, processes, and environments that meets or exceeds expectations* (Davis, 1997). Mutu merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.

Menurut Feigenbaum *quality is customer determination, not an engineer's determination, not a marketing determination or a general management determination* (Feigenbaum, 1991). Mutu adalah seluruh gabungan sifat-sifat produk atau jasa pelayanan dari pemasaran, *engineering*, manufaktur, dan pemeliharaan di mana produk atau jasa pelayanan dalam penggunaannya akan bertemu dengan harapan pelanggan. Menurut Pekar mengatakan: *"quality, simply defined as: providing goods and services that meet or exceed customer requirements"* (Pekar, 1995). Mutu secara sederhana didefinisikan sebagai penyediaan barang dan jasa yang memenuhi atau melampaui persyaratan pelanggan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, penjaminan mutu pendidikan didefinisikan sebagai kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan (Kemendiknas, 2009). Secara operasional, definisi penjaminan mutu adalah serangkaian proses dan sistem yang terkait untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data mutu tentang kinerja, staf, program,

dan lembaga. Data empirik ini selanjutnya dibandingkan dengan acuan mutu untuk mengetahui ketercapaiannya (Kazeem & Hashim, 2019).

Penjaminan mutu pendidikan adalah serangkaian proses untuk mengumpulkan, menganalisis kinerja, program dan lembaga pendidikan dengan kemampuannya memberikan kepuasan atau melebihi harapan dari peserta didik, masyarakat dan pemerintah dalam memenuhi kebutuhannya.

Peraturan Pemerintah (PP) No.19 tahun 2005 ini merupakan bagian dari penerapan manajemen mutu yang mengimplementasikannya melalui perangkat-perangkat seperti perencanaan mutu (*quality planning*), pengendalian mutu (*quality control*), jaminan mutu (*quality assurance*), dan peningkatan mutu (*quality improvement*). Tanggung jawab manajemen mutu terdapat pada semua tingkatan manajemen dan implementasinya melibatkan semua orang pada semua unit dalam organisasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota/kabupaten dan pada organisasi satuan tingkat pendidikan/kampus. Perencanaan mutu (*quality planning*) dalam konteks kampus tentunya adalah pemenuhan akan kebijakan mutu tentang 8 standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, sasaran dari program kampus adalah pencapaian dari 8 standar minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sementara itu dalam melaksanakan pengendalian mutu (*quality control*) dalam PP No.19 tahun 2005 dijelaskan bahwa dalam rangka pengendalian mutu akan dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah tingkat provinsi, pemerintah daerah tingkat kota/kabupaten, tingkat satuan pendidikan, Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP), dan Badan Akreditasi Nasional (BAN).

Manajemen mutu merupakan satu cara dalam mengelola suatu organisasi yang bersifat komprehensif dan terintegrasi. Manajemen mutu diarahkan dalam rangka: (1) Memenuhi kebutuhan konsumen secara konsisten, dan (2) Mencapai peningkatan secara terus menerus dalam setiap aspek aktivitas organisasi. Total *Quality Management* (TQM) *is the integration of all functions and processes within an organization in order to achieve continuous improvement of the quality of goods and services. The goal is customer statisfaction* (Vincent K. Omachonu, Ph.D, Joel E. Rpss, 2005).

Sasaran yang dituju dari manajemen mutu adalah meningkatkan mutu pekerjaan, memperbaiki produktifitas dan efesiensi melalui perbaikan kinerja dan peningkatan mutu kerja agar menghasilkan lulusan yang memuaskan atau memenuhi kebutuhan dalam masyarakat (Syahid, A & Tulung, 2016). Jadi, manajemen mutu bukanlah seperangkat prosedur proses untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan mutu kerja. Dapat pula dikatakan bahwa hakekat manajemen mutu adalah suatu sistem manajemen yang secara terus menerus mengusahakan dan diarahkan untuk meningkatkan lulusan dengan memperhatikan proses pembelajaran. Dalam bidang pendidikan, manajemen mutu merupakan cara dalam mengatur semua sumber daya pendidikan, yang diarahkan agar semua orang yang terlibat didalamnya melaksanakan tugas dengan penuh semangat dan berpartisipasi dalam perbaikan serta pelaksanaan dan proses pembelajaran.

Sistem manajemen mutu dengan menerapkan pembakuan mutu model ISO 9000 dalam bidang pendidikan bisa diterapkan dalam bidang pendidikan. Menurut Sallis di negara-negara maju seperti the United States has the *Malcolm Baldrige Award* and the Japanese have the *Deming Prize*. The European Foundation for Quality Management has developed the successful *European Quality Award*, while internationally there is the important International Standard ISO9000 series (Edward, 2005).

Dalam rangka penerapan model ini filosofi yang mendasari ISO 9000 diantaranya bahwa mutu pendidikan harus menjadi bagian dari sistem manajemen. Atas dasar filosofi ini proses ini sistem yang menjamin dihasilkannya produk, yaitu jasa pendidikan, yang sesuai dengan atau melebihi harapan konsumen bisa dilakukan dengan pengukuran yang tepat.

Dalam rangka menuju ke arah pembakuan mutu pendidikan sebagaimana yang dilakukan melalui sertifikasi ISO 9000 perlu ditetapkan terlebih dahulu apa yang menjadi fokus penjaminan mutu. Keterkaitan dengan ini, *Department for Education and Children's Services* (1996) misalnya, menjalankan agar penjaminan mutu difokuskan pada proses hasil pendidikan.

Dalam upaya merumuskan fokus penjaminan mutu ini, metode seperti yang dikemukakan di atas yakni dengan merumuskannya respon terhadap pertanyaan-pertanyaan, bukan merupakan satu-satunya metode. Oleh

karena itu, apabila konsep penjaminan mutu ini akan diterapkan, dan bisa menemukan cara lain yang mungkin lebih komprehensif dalam merumuskan fokus, dengan tujuan yang terkait dengan sistem, proses dan hasil pendidikan tersebut terjamin mutu berdasarkan baku mutu yang telah ditetapkan.

Meskipun demikian, perlu dijadikan catatan, bahwa apabila model penjaminan akan diterapkan dalam bidang pendidikan, maka diperlukan adanya hal-hal sebagai berikut:

1. Komitmen yang tinggi dari seluruh unsur yang terlibat dalam proses pendidikan.
2. Penilaian kebutuhan (*Need Assesment*).
3. Perencanaan strategik. Mengarah pada penyusunan perencanaan strategik, dengan memperhatikan langkah-langkah penyusunan strategik ini meliputi perumusan visi dan misi, identifikasi konsumen dan kebutuhannya, analisis K2PA (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) dan identifikasi faktor-faktor tertentu keberhasilan penyusunan rencana strategis, perumusan kebijakan dan rencana mutu, penyusunan biaya dan evaluasi serta umpan balik.
4. Penyusunan rencana taktis. Rencana taktis ini berkaitan dengan bagaimana melaksanakan sesuatu yang sudah ditetapkan dalam rencana strategis, terutama menyangkut siapa, akan melakukan apa, cara melaksanakan tugas-tugas, waktu penyelesaian tugas-tugas dan sumber daya yang memungkinkan untuk digunakan.
5. Penilaian kemajuan. Salah satu kegiatan penting dalam kegiatan perbaikan mutu adalah penilaian kemajuan penilaian ini mencakup semua langkah yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan kemajuan yang telah dicapai dalam setiap langkah itu.

Penerapan sistem manajemen penjaminan mutu, sebagai mana dalam dunia pendidikan, sebaiknya ada lembaga atau organisasi independen yang menangannya serta mensertifikasi kampus-kampus yang derajat mutunya memenuhi kriteria manajemen mutu. Lembaga atau organisasi inilah yang melakukan pembakuan mutu setiap komponen fokus penjaminan mutu.

Selanjutnya, setiap kampus, bahkan setiap daerah menyesuaikan mutu sistem, proses dan hasil pendidikan yang baku itu. Apabila dilakukan, kampus-kampus yang semua komponen sistem, proses dan hasil pendidikannya telah memenuhi kriteria baku mutu bisa mengajukan untuk memperoleh sertifikasi jaminan mutu dari organisasi internasional tersebut. Dengan demikian, penerapan program penjaminan mutu bisa dikaitkan dengan penerapan manajemen berbasis kampus (*School Based Management*) serta dalam rangka mengantisipasi pelaksana otonomi atau desentralisasi dalam sektor pendidikan. Sejalan dengan itu, perubahan struktur kewenangan penyelenggaraan pendidikan Manajemen Berbasis Sekolah/kampus (MBS) merupakan momentum yang tepat untuk melakukan reformasi sistem manajemen pendidikan di sekolah. Pembangunan pendidikan selama ini lebih banyak didominasi oleh pemerintah sudah seharusnya direformasi karena terbukti kurang efektif, efisien dan produktif (Mulyasa, 2001) (Suhaemi & Aedi, 2015).

Gaspersz menyatakan bahwa: di dalam melaksanakan pengendalian mutu secara terpadu memerlukan beberapa hal yang berkaitan dengan pengorganisasian struktur kerja, pendokumentasian yang efektif, prosedur teknik dan manajerial yang terintegrasi, di mana semuanya akan dijadikan sebagai petunjuk dalam melaksanakan tindakan koordinasi terhadap tenaga kerja, sarana, informasi dan lainnya untuk memenuhi kepuasan pelanggan serta mampu menekan ongkos produksi sampai tingkat minimum (Gaspersz, 2011).

Manajemen Mutu Terpadu (MMT) memberikan jaminan bagi masyarakat, bahwa organisasi mempunyai tanggung jawab tentang kualitas dan mampu menyediakan mutu lulusan/output yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. Management Mutu Terpadu (MMT) yang efektif harus dapat memastikan bahwa kegiatan-kegiatan selalu diawasi dan didokumentasikan. Hal ini memungkinkan setiap orang mengetahui apa yang mereka kerjakan dan bagaimana mereka mengerjakannya.

B. PENGERTIAN MUTU TERPADU

Secara klasik, pengertian mutu atau *quality* menunjukkan kepada sifat yang menggambarkan derajat “baik” nya suatu lembaga dengan kriteria tertentu. Sallis (1993), menyebut konsep semacam ini sebagai konsep

mutu yang bersifat *absolut*. Sebagai lawan dari konsep yang absolut adalah konsep mutu yang bersifat relatif. Pandangan klasik tentang mutu yang bersifat absolut ini membawa implikasi, bahwa dalam memproses pendidikan digunakan kriteria untuk menilai mutu dan kriteria itu dapat ditentukan dengan baik. Atau dasar kriteria itu dapat digunakan untuk menentukan kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, dalam rangka proses manajemen agar menghasilkan kampus yang bermutu dilembaga yang bersangkutan biasanya yang menjalankan fungsi pengendalian mutu (*Quality Control*). Staf yang bertugas membuat penilaian (*Judgement*) berdasarkan kriteria tertentu terhadap kualitas proses yang dilaksanakan pada kampus/lembaga pendidikan, apakah termasuk kategori tidak bermutu, atau bermutu tinggi (Royce Sadler, 2014).

Tujuan utama dari sistem manajemen mutu ini adalah untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam melakukan proses dengan cara mengusahakan agar semua langkah yang dilaksanakan oleh kampus sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Apabila terjadi kesalahan dalam proses yang dilakukan kampus itu segera dilakukan perbaikan, sehingga terjadinya kerugian yang lebih besar bisa dihindari terutama dalam membentuk serta membangun keberadaan kampus lebih mandiri. Mutu pendidikan sangat tergantung oleh kemampuan suatu bangsa dalam mengelolanya. Kemampuan tersebut tidak hanya dengan niat semata, melainkan dengan usaha yang keras dan berkesinambungan dengan menggunakan berbagai cara. Cara tersebut dengan mengaplikasikan sistem atau teknik yang sering digunakan dalam manajemen modern saat ini (Herman, 2015).

Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran/perkuliahan pada satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan. Dalam melaksanakan standar proses yang berisi kriteria minimal proses pembelajaran/perkuliahan yang dilaksanakan pada satuan pendidikan. Standar proses meliputi perencanaan proses pembelajaran/perkuliahan, pelaksanaan proses pembelajaran/perkuliahan, penilaian hasil pembelajaran/perkuliahan, dan pengawasan proses pembelajaran/perkuliahan untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien (PP RI Nomor 19 tahun 2005).

C. PENJAMINAN MUTU DI STAI MU

Penjaminan mutu STAI MU Tanjungpinang saat ini diupayakan melalui penerapan suatu kebijakan mutu secara terpadu. Terpadu bermakna kebijakan peningkatan mutu dilakukan secara menyeluruh melibatkan semua komponen dan berlangsung secara terus menerus. Kebijakan manajemen mutu dimaksud diuraikan secara rinci seperti berikut.

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi merupakan suatu ke-niscayaan yang ditujukan untuk menjamin mutu perencanaan dan penyelenggaraan lulusan perguruan tinggi. Penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi didasarkan pada amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pasal 51 ayat 2 yang menyatakan bahwa “Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan”.

Pelaksanaan undang-undang tersebut diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa “Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi”. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 menyatakan “Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu”. Lebih lanjut menyatakan bahwa “Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat”.

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, meliputi penjaminan mutu internal maupun penjaminan mutu eksternal. Hal ini dinyatakan dalam Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) bahwa “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dilakukan atas dasar penjaminan mutu internal, dan penjaminan mutu eksternal”. Penjaminan mutu internal adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh institusi perguruan tinggi yang bersangkutan dengan berpedoman dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Penjaminan mutu eksternal adalah penjaminan mutu yang

dilaksanakan oleh badan atau lembaga eksternal yang dibentuk dan atau disetujui oleh pemerintah sebagai penyelenggara evaluasi penjaminan mutu bagi perguruan tinggi.

Sistem penjaminan mutu Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum (STAI MU) Tanjungpinang dilakukan secara bertahap, sistematis, terencana, dan terarah. Secara bertahap, sistem penjaminan mutu STAI MU telah membentuk Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), lembaga ini selanjutnya secara sistematis dan terencana menyusun program penjaminan mutu baik akademik maupun non akademik yang memiliki arah target dan kerangka waktu yang jelas. Selanjutnya penjaminan mutu tersebut akan menjadi budaya dan kegiatan rutin berlaku keseharian segenap sivitas akademika STAI MU. Harapan akan tercipta sistem penjaminan mutu yang dipercaya sehingga dapat meningkatkan kemampuan institusi untuk mewujudkan stabilitas, kapabilitas, akuntabilitas, serta melakukan pengawasan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan.

D. KEBIJAKAN MUTU

Kebijakan mutu STAI MU diuraikan sebagai berikut:

1. Komitmen menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), memiliki akhlak mulia, berjiwa wirausaha, berwawasan nasional maupun internasional yang dilandasi nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Allah swt.
2. Komitmen STAI MU ikut berperan aktif mencerdaskan kehidupan bangsa melalui proses perkuliahan yang bermutu.
3. Komitmen STAI MU untuk senantiasa melakukan perubahan dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pembinaan iman dan taqwa.
4. Komitmen STAI MU untuk mendorong pelaksanaan dan pengembangan penelitian.
5. Komitmen STAI MU dalam mengembangkan kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai wujud pelaksanaan darma perguruan tinggi.
6. Komitmen STAI MU berpartisipasi secara aktif dalam memecahkan persoalan-persoalan kemasyarakatan, di bidang ekonomi, dan pendidikan akhlak.

Komitmen STAI MU untuk menyelenggarakan penilaian dan pengendalian terhadap mutu semua aspek akademik dan non akademik secara berkesinambungan, transparan, adil, dan akuntabel.

BAB 4

MODEL EVALUASI YANG DIGUNAKAN DALAM PENELITIAN

A. EVALUASI PROGRAM MODEL CIPP (DIKEMBANGKAN OLEH STUFFLEBEAM)

Evaluasi program dengan model CIPP pada penerapannya banyak digunakan oleh para evaluator disebabkan model ini meninjau program lebih menyeluruh jika dibandingkan dengan model lainnya. Model evaluasi ini diperkenalkan dan dikembangkan Stufflebeam, dkk (1967). Dia membuat pedoman kerja untuk melayani para manajer dan administrator menghadapi empat macam keputusan pendidikan, membagi evaluasi menjadi empat macam, yaitu: CIPP singkatan dari, *context*, *input*, *process*, dan *product*. Empat uraian dari CIPP tersebut menjadi komponen tahapan evaluasi (Tayipnapsis, 2008).

Orientasi evaluasi dengan model CIPP yaitu pada suatu keputusan “*a decision oriented evaluation approach structured*”. Tujuan evaluasi adalah untuk membantu pihak yang terkait dengan program dalam rangka membuat keputusan. Stufflebeam, (1993) dalam Eko Putro Widoyoko mengungkapkan bahwa, “*the CIPP approach is based on the view that the most important purpose of evaluation is not to prove but improve*”. Konsep pendekatan evaluasi tersebut ditawarkan oleh Stufflebeam yang berpandangan bahwa tujuan penting evaluasi adalah untuk memperbaiki, bukan hanya membuktikan (Widayoko, 2009). Komponen atau dimensi

evaluasi dengan model CIPP yang meliputi, *context, input, process, product* diuraikan seperti berikut ini (Mohammad Abdul Wahid Usmani, Suraiya Khatoon, Marwan M. Shammot, & Ahmad M. Zamil, 2012).

1. Context Evaluation (Tahap Evaluasi Konteks)

Stufflebeam (1983) dalam Hamid Hasan menyatakan bahwa: tujuan tahap evaluasi konteks yang utama yaitu untuk mengungkap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki pihak yang dievaluasi (Hasan, 2009). Kekuatan dan kelemahan yang telah diungkap evaluator dapat memberikan arah perbaikan yang diperlukan. Arikunto dan Cepi menjelaskan bahwa: evaluasi konteks adalah upaya menggambarkan dan merinci lingkungan kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi dan sampel yang dilayani, serta tujuan program. Arikunto memberikan contoh evaluasi program dengan menggunakan pertanyaan yang mengungkap tentang: 1) Kebutuhan apa saja yang belum dipenuhi oleh program; 2) Tujuan pengembangan yang belum dicapai oleh program; 3) Tujuan pengembangan yang dapat membantu pengembangan masyarakat, misalnya kesadaran anggota masyarakat; 4) Tujuan yang paling mudah dicapai (Suharsimi Arikunto, 2010).

2. Input Evaluation (Tahap Evaluasi Masukan)

Tahap evaluasi input, atau evaluasi masukan merupakan tahap kedua dari model CIPP. Evaluasi masukan membantu mengatur keputusan, menentukan sumber, alternatif yang dapat diambil, rencana dan strategi pencapaian tujuan, dan prosedur kerja semestinya untuk mencapainya. Tahap evaluasi ini meliputi komponen: 1) sumber daya manusia (SDM); 2) sarana dan peralatan penunjang; 3) dana atau anggaran; serta 4) berbagai tatacara dan aturan yang dibutuhkan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada tahap evaluasi masukan digunakan untuk mengungkap: 1) pengaruh diberlakukannya program; 2) sikap penerimaan pihak-pihak sasaran program; 3) reaksi dari sasaran program dan; 4) sejauhmana pengaruh program terhadap sasaran. Stufflebeam mengungkapkan dalam Arikunto bahwa pertanyaan yang terkait dengan evaluasi masukan mengarah pada pemecahan masalah untuk mendorong diselenggarakannya program yang bersangkutan (Suharsimi Arikunto, 2010).

Process Evaluation (Tahap Evaluasi Proses)

Tentang tahap evaluasi proses dalam Eko Putro Widoyoko, Worthen & Sanders (1981) mengungkapkan bahwa: evaluasi proses menitikberatkan pada tiga tujuan yaitu: “(1) *do detect or predict in procedural design or its implementation during implementation stage*, (2) *to provide information for programmed decision*, and (3) *to maintain a record of the procedure as it occurs*” (Widayoko, 2009). Tahap evaluasi ini digunakan untuk mencari tahu atau menjangka rancangan prosedur atau rancangan penerapan selama tahap implementasi. Tahap ini juga memberi informasi untuk keputusan program dan merekam atau menyimpan tahapan langkah yang telah dilakukan. Tahapan evaluasi proses pada dasarnya untuk mengungkap sampai sejauhmana rencana telah diterapkan dan komponen apa yang perlu diperbaiki. Arikunto menyatakan bahwa evaluasi proses dalam model CIPP merujuk pada “apa” (*What*) kegiatan yang dilaksanakan dalam program, “siapa” (*Who*) yang ditunjuk sebagai penanggung jawab program, “kapan” (*When*) kegiatan selesai. Evaluasi proses diarahkan untuk seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan di dalam program sudah terlaksana sesuai dengan rencana. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam tahapan ini bertujuan mengungkap: 1) Kesesuaian pelaksanaan program dengan jadwal; 2) Kemampuan pihak yang terlibat didalam pelaksanaan program dalam menangani kegiatan selama program berlangsung dan bisakah program dilanjutkan; 3) Kemaksimalan pemanfaatan sarana dan prasarana yang disediakan dan; 4) Kemungkinan dan keberadaan hambatan apa saja yang ditemui selama pelaksanaan dan bila program dilanjutkan (Suharsimi Arikunto, 2010).

3. Product Evaluation (Tahap Evaluasi Produk/Hasil)

Stufflebeam (2002) dalam Hanchell memaparkan pengertian evaluasi produk/hasil adalah “*referred to as “impact evaluation” because it assesses a program’s reach to the targeted audience to make a judgment of the extent the program addressed the needs of the population it serves*” (Hanchell, 2014a). Evaluasi produk diharapkan dapat membantu pihak pimpinan untuk membuat keputusan yang berkenaan dengan kelanjutan, akhir, maupun modifikasi program. Tayibnapis menyatakan juga bahwa evaluasi produk digunakan untuk membantu pengambilan keputusan

selanjutnya, baik mengenai hasil yang telah dicapai maupun apa yang dilakukan setelah program berjalan (Tayipnaps, 2008).

Pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa: evaluasi produk merupakan penilaian yang dilakukan dalam rangka menentukan ketercapaian atau keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tahapan evaluasi ini memungkinkan seorang evaluator dapat menentukan atau memberikan rekomendasi apakah suatu program dapat dilanjutkan, dikembangkan dimodifikasi, atau bahkan dihentikan. Tahap akhir evaluasi ini mengungkap tentang: 1) Pencapaian berbagai tujuan yang sudah ditetapkan; 2) Rumusan keterkaitan antara rincian proses dengan pencapaian tujuan; 3) Berbagai kebutuhan pelajar/mahasiswa yang sudah dapat dipenuhi; 4) Dampak yang diperoleh pelajar/mahasiswa dalam waktu yang relatif panjang dengan adanya program (Arikunto, 2007).

B. KELEBIHAN DAN KETERBATASAN EVALUASI DENGAN MODEL CIPP

Model evaluasi CIPP menurut sebagian besar ahli memiliki kerangka kerja menyeluruh di antara model evaluasi yang ada. Hal ini disebabkan oleh objek evaluasi mencakup konteks, masukan, proses, dan hasil, tidak hanya tinjauan pada hasil saja. Model evaluasi CIPP ini juga memiliki keterbatasan, antara lain penerapan model ini dalam bidang program pembelajaran di kelas mempunyai tingkat keterlaksanaanya kurang tinggi jika tanpa dimodifikasi (Hanchell, 2014a).

Hasil penelitian telah dipaparkan berdasarkan tahapan model evaluasi CIPP yaitu konteks, masukan, proses, dan produk. Pembahasan dilakukan untuk menjawab permasalahan penelitian. Pembahasan terhadap hasil penelitian dengan meninjau teori yang mendukung dan hasil penelitian yang relevan.

1. Dasar Hukum, Tujuan, Sasaran dan Strategi Program Kerja Manajemen Mutu LPM

Kebijakan manajemen mutu dan program kerja LPM STAI MU berlandaskan dasar keimanan Islam, perundang-undangan dan peraturan menteri. Kebijakan mutu dan program kerja suatu lembaga pendidikan tinggi yang memiliki landasan hukum berupa perundangan atau

peratururan penting selain tuntutan moral dan profesional, terutama lembaga swasta seperti STAI MU (Russo, 2013). Landasan hukum ini sangat bermanfaat bagi pengajar/dosen maupun pembuat kebijakan (Russo, 2013). Dosen lebih meyakini bahwa program kebijakan mutu yang mengarah pada pencapaian mutu yang lebih baik dapat diupayakan tercapai. Pembuat kebijakan seperti Ketua STAI MU, Ketua Prodi, maupun Ketua LPM memiliki wewenang untuk menerapkan kebijakan mutu agar peningkatan mutu juga dapat dicapai. Landasan hukum program kebijakan dan manajemen mutu dalam lingkup hukum pendidikan, lebih jauh dapat berperan dalam kepastian hak yang tentunya terkait dengan kewajiban individu maupun kelompok (Harris, 2007). Pimpinan perguruan tinggi yaitu Ketua, Pembantu Ketua, Ketua Prodi hingga dosen, mahasiswa dan staf secara individu mengetahui dan memahami tentang hak dan kewajiban terkait program kebijakan dan manajemen mutu, demikian juga secara kolektif mengetahui hal tersebut. Landasan hukum program kebijakan dan manajemen mutu juga merupakan suatu bentuk penataan kerangka kerja yang dapat meningkatkan kepatuhan pihak yang terkait dengan program dan dapat mendukung proses pelaksanaan program nantinya, sehingga memfokuskan program pada pencapaian tujuan (Kohoutek, 2009).

Kebijakan manajemen mutu dan program kerja LPM STAI MU memiliki tujuan dan sasaran yang jelas. Tujuan dalam suatu program merupakan hal sangat penting dalam evaluasi program dan bahkan dalam pelatihan praktis evaluasi program. Pentingnya tujuan dimaksud dapat dinyatakan dalam tiga langkah pelatihan evaluasi program menurut Benson et.al yaitu: (a) mengembangkan misi atau tujuan; (b) menentukan posisi program dalam kerangka kebijakan, termasuk kekuatan dan kelemahan; dan (c) merencanakan masa depan dengan menetapkan tujuan dan membantu peserta menentukan strategi mereka untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Tujuan bermanfaat bagi evaluator membantu anggota staf program dan peserta menentukan jenis bukti yang dibutuhkan untuk mendokumentasikan dan memantau kemajuan yang dapat dipercaya sesuai tujuan dimaksud (Benson, Hinn, & Lloyd, 2001).

Tujuan STAI MU didirikan tentu untuk menghasilkan lulusan sarjana yang semakin bermutu sesuai program studi yang ada. Peningkatan mutu dapat diupayakan melalui penerapan kebijakan mutu dan program-

program unggulan. Kebijakan manajemen mutu dan program kerja LPM menggunakan strategi yang memfokuskan pada lulusan. Perlu diperhatikan bahwa kebijakan mutu terkait dengan diterapkannya sistem penjamin mutu. Penerapan sistem manajemen yang berdayaguna harus berfokus pada kualitas program. STAI MU sebagai suatu lembaga pendidikan tinggi harus terlebih dahulu memiliki kesepakatan yang kuat antara komponen kampus dan pemangku kepentingan utama lainnya mengenai tujuan program, masukan, aktivitas, dan proses yang akan digunakan untuk mencapai tujuan (Benson et al., 2001).

Tujuan program maupun tujuan suatu lembaga pendidikan tinggi merupakan kajian penting yang muncul dalam meninjau mutu pendidikan tinggi. Terkait kualitas pendidikan tinggi yang terpenting adalah kualitas yang bergantung pada apa tujuan pendidikan tinggi tersebut. Tujuan dan fungsi pendidikan tinggi semetinya berubah seiring berjalannya waktu dalam rangka menyesuaikan kebutuhan lulusan (Benson et al., 2001).

Program penjamin mutu STAI MU selain memiliki tujuan, juga menguraikan sasaran yang jelas dan konsisten. Hal ini menunjukkan program dapat diimplementasikan secara efektif. Efektivitas implementasi yang dapat dilakukan oleh program penjamin mutu dan berbagai aspek pendukungnya melalui salah satu kriteria dari enam kriteria kondisi umum yang diungkap oleh Kohoutek (Jan Kohoutek, 2009).

Hasil penelitian tahapan konteks dasar hukum, tujuan, sasaran dan strategi program kerja manajemen mutu LPM di STAI MU sesuai dengan kriteria studi evaluasi yang telah dilakukan dalam lingkup perguruan tinggi Islam swasta. Prinsip-prinsip hasil penelitian konteks ini tentu diharapkan dapat berlaku pada institusi pendidikan lainnya. Hasil penelitiannya ini juga dapat digunakan sebagai pembanding dari hasil penelitian Sadler tentang konteks program penjamin mutu yang dipaparkan dalam makalah hasil penelitiannya (Royce Sadler, 2014). Pengungkapan konteks program penjamin mutu dalam penelitian ini dianggap penting sebelum evaluasi masukan. Kontek dimaksud dalam aspek dasar hukum, tujuan, sasaran dan strategi secara menyeluruh. Pentingnya pengungkapan konteks program secara menyeluruh perlu dilakukan sebagaimana dapat dibandingkan dari hasil penelitian tentang evaluasi dengan model CIPP dalam evaluasi pendidik oleh Wahid et. Al (Mohammad Abdul Wahid Usmani et al., 2012).

2. Masukan Sarana-prasarana, Anggaran, Monitoring, Pimpinan, Dosen dan staf Program Penjamin Mutu LPM

Masukan sarana prasarana program penjamin mutu LPM STAI MU memenuhi standar pendirian perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi Islam Swasta dalam lingkup Kopertais (Kordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta), namun belum memenuhi kriteria evaluasi dari sisi keidealanya. Sarana dan prasarana merupakan kebutuhan dasar dalam pelaksanaan berbagai program di perguruan tinggi. Sarana dan prasarana merupakan masukan yang dapat dikendalikan oleh institusi perguruan tinggi sebagaimana diungkapkan oleh Turner (Turner, 2011).

Masukan anggaran penjamin mutu LPM STAI MU telah mencukupi dan monitoring pelaksanaan program dilakukan dengan baik, tetapi ketersediaan anggaran dalam proses berjalanya fungsi sebagai sekolah tinggi belum memadai. Penyediaan anggaran penjamin mutu diupayakan berdasarkan kebutuhan lembaga. Prinsip pengurangan biaya mahal dengan mempertahankan hasil yang maksimal belum diterapkan di LPM STAI MU. Prinsip ini sebenarnya dapat dilakukan sebagaimana umumnya diterapkan di perguruan tinggi swasta di Asia (Asian Development Bank, 2012).

Penjaminan mutu dalam bentuk program sangat terkait dengan monitoring. Hal ini karena penjaminan mutu mencakup monitoring sistem mutu lembaga, dukungan dan peningkatan mutu. Dukungan anggaran dalam pelaksanaan program monitoring menjadi sama penting dengan penjamin mutu itu sendiri sebagaimana ungkapan Brown (Brown, 2004). Pendapat McGhee yang menyatakan penjaminan mutu tidak dapat sepenuhnya dipahami tanpa mempertimbangkan bagaimana monitoring diupayakan perlu juga dicermati (McGhee, 2005). Masukan anggaran penjamin mutu LPM STAI MU yang mencukupi diiringi monitoring pelaksanaan program dilakukan dengan baik sangat tepat diupayakan serta dipertahankan kesinambungannya.

Pimpinan, dosen, dan staf sebagai masukan program pemjamin mutu STAI MU sangat mendukung pencapaian mutu yang direncanakan, sehingga sesuai dengan kriteria evaluasi. Peran pimpinan dalam kerangka program penjamin mutu dapat berfungsi sebagai faktor pendukung dari sisi manajerial. Dukungan manajerial dalam bentuk sumber daya harus dilakukan secara berkesinambungan Hasil penelitian di Universitas

Terbuka Zimbabwe terungkap bahwa dukungan manajerial yang berkelanjutan melalui alokasi sumber daya sangat dibutuhkan untuk mengatasi ketidaksesuaian (Nyenya, T & Gabi, 2016). Ketidaksesuaian dimaksud dalam suatu program penjamin mutu yaitu antara tujuan dan sasaran atau capaian mutu yang direncanakan sebelumnya.

Pimpinan, dosen, dan staf sebagai masukan program penjamin mutu STAI MU juga terkait dengan perlunya kesepakatan. Penerapan sistem manajemen bermanfaat pada kualitas program, lembaga harus terlebih dahulu mencapai tingkat kesepakatan yang wajar antara pimpinan, dosen dan staf, serta pemangku kepentingan utama lainnya mengenai tujuan program dan masukan, aktivitas, dan proses yang akan digunakan untuk mencapai tujuan. Lembaga publik seperti STAI MU seringkali dapat mencapai kesepakatan tersebut melalui proses perencanaan strategis yang mencakup konsultasi luas antara pimpinan dan staf. Konsultasi dapat mempengaruhi alokasi sumber daya yang dibutuhkan (Benson et al., 2001).

Dosen sebagai masukan program penjamin mutu memiliki posisi sentral. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang tugas utamanya adalah untuk mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat (Suhaemi & Aedi, 2015). Masukan dosen yang bermutu sangat mendukung dalam keberhasilan pencapaian program penjamin mutu suatu pendidikan tinggi. Jumlah dan kualitas dosen di STAI MU dipandang sebagai masukan program yang mendukung penjaminan mutu telah memadai dan terus diupayakan peningkatan mutunya. Hasil penelitian tentang isu dan tantangan dosen di perguruan tinggi Islam dan beberapa aspek terkait mutu dapat digunakan sebagai perbandingan. Hasil penelitian menyatakan bahwa: fasilitas dan kondisi kerja yang lebih baik dapat lebih meningkatkan keterampilan penelitian di kalangan dosen. Hal ini memungkinkan dosen menjadi kreatif dan inovatif sebelum dapat menghasilkan produk yang benar-benar berkualitas. Penelitian mahasiswa berkualitas yang diawasi oleh dosen diupayakan sesuai dengan pemikiran dan penalaran Islam (Suhaemi & Aedi, 2015).

Staf beserta dosen dan pimpinan perguruan tinggi seperti STAI MU selain secara bersama membuat kesepakatan terkait program penjamin

mutu juga memiliki peran penting lainnya. Staf akademik secara khusus dapat mendorong perencanaan, pengembangan, peninjauan ulang dan evaluasi proses perkuliahan yang efektif merupakan inti tujuan pencapaian mutu, dapat menjadi pendamping dalam pengabdian masyarakat bila dibutuhkan (Doherty, 1994).,

Terkait dengan manajemen staf dalam kerangka masukan program penjamin mutu ini, pimpinan STAI terutama pimpinan LPM meninjau hasil penelitian tentang pengembangan, perbandingan tanggapan staf di perguruan tinggi negeri dan swasta di Austria oleh Mohsin et al. Hasil penelitian mengungkap bahwa staf universitas negeri lebih puas dengan universitas mereka dibandingkan dengan universitas swasta karena faktor utama yaitu keamanan kerja. Pengembangan staf dan beban kerja yang optimal dapat meningkatkan kemajuan perguruan tinggi swasta. Keamanan lapangan kerja termasuk kegiatan penelitian yang tidak dapat dihindari. Komitmen yang terus ditingkatkan diperlukan untuk keberhasilan setiap PT dengan penerapan pengelolaan sumber daya manusia melalui proses seleksi staf, penilaian kinerja yang netral, penghargaan dan tunjangan, kesempatan pengembangan staf, pelatihan dan pengembangan karir, serta keamanan kerja (Mohsin, N. Mohammad., Khan, M. Tariq., Awan, S. Ahmed., Doger, 2011).

C. PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PENJAMIN MUTU LPM

Program kerja penjamin mutu LPM STAI MU dilaksanakan dengan perencanaan yang matang, terkordinasi, dimonitoring dan diaudit secara internal serta eksternal, serta dilakukan pelaporan pelaksanaannya yang sesuai dengan kriteria evaluasi. Proses perencanaan merupakan tahapan untuk tercapainya kesepakatan antara pimpinan, staf dan pihak yang terkait dengan program. Perencanaan strategis tersebut mencakup konsultasi secara luas antara pimpinan PT dan staf, pihak yang menentukan alokasi sumber daya yang dibutuhkan, pembuat keputusan atau kebijakan yang mempengaruhi lembaga atau program, serta berbagai komponen kunci lainnya (Mohsin, N. Mohammad., Khan, M. Tariq., Awan, S. Ahmed., Doger, 2011). Perencanaan program penjamin mutu di STAI MU menurut informan kunci cukup baik. Kualitas perencanaan ini dapat dibandingkan dengan hasil penelitian tentang perencanaan program, namun dalam hal

program persiapan dosen oleh lembaga pelatihan pengajar di universitas swasta. Terungkap bahwa kebijakan perencanaan dan persiapan dosen oleh lembaga pelatihan masih lemah dan kurang memperhatikan aspek penilaian kebutuhan atau pemetaan (Mohsin, N. Mohammad., Khan, M. Tariq., Awan, S. Ahmed., Doger, 2011).

Faktor perencanaan program manajemen mutu serta berbagai tahapan lanjutannya yang terkait inilah sebagai penentu perbedaan yang signifikan penjaminan mutu di salah satu Universitas Negeri berbasis Islam dengan salah satu Universitas Negeri di Indonesia. Sistem penjaminan mutu pada penelitian adalah penerapan sistem penjaminan mutu, inti perencanaan nilai mutu, implementasi penjaminan mutu, evaluasi penjaminan mutu, faktor yang mendukung dalam mengimplementasikan penjaminan mutu, strategi penjaminan mutu, dan hasil penjaminan mutu. Perbedaan penjaminan mutu tampak pada aspek manajemen lembaga, aspek akademik, dan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan di Universitas Negeri berbasis Islam dipengaruhi oleh kualitas manajemen dan akademik dengan proporsi yang lebih besar dibandingkan di Universitas Negeri umum (Fitri, 2016).

Kordinasi pelaksanaan program penjamin mutu penting dalam upaya pencapaian keberhasilan peningkatan mutu. Salah satu faktor yang dapat dipengaruhi kordinasi pelaksanaan program penjamin mutu yang kurang baik secara langsung adalah keberlangsungan program itu sendiri. Faktor lainnya yang sangat penting adalah peningkatan mutu dosen bila program terkait dengan peningkatan mutu dosen. Mutu dosen yang kurang baik berakibat mutu perkuliahan yang rendah. Mutu perkuliahan yang rendah menghasilkan mutu lulusan yang juga rendah dan tidak berkompeten dalam bidang ilmunya. Akhirnya dunia kerja tidak akan memanfaatkan lulusan PT tersebut atau lulusan kalah bersaing di dunia kerja (Dronkers, 2010).

Monitoring dan audit secara internal dan eksternal, serta dilakukan pelaporan pelaksanaannya sesuai dengan kriteria. Perubahan dari pengendalian mutu hingga penjaminan dan peningkatan mutu dapat terlihat dari perubahan pengaturan secara formal. Pengendalian menyiratkan pemeriksaan pada akhir tujuan, kepastian pencapaian tujuan mutu melibatkan mekanisme audit dan sistem manajemen mutu yang melekat

pada setiap tahapan proses program dalam mencapai tujuan. Tujuannya dimaksud adalah dalam rangka mengungkap menginterogasi mekanisme peraturan yang menjamin dan meningkatkan mutu. Audit penjaminan mutu berfokus pada sistem penjaminan mutu organisasi, tujuan dan sasaran (Morley, 2003). Keberhasilan audit ini bergantung pada auditor dan pihak yang diaudit terkait pandangan apakah audit dianggap sebagai pemeriksaan untuk pengembangan lembaga (Doherty, 1994). Proses audit kelembagaan dimaksudkan untuk menggabungkan pengawasan sistem penjamin mutu internal maupun secara eksternal pada tingkat lembaga dengan penyelidikan tentang bagaimana sistem tersebut terlaksana hingga tingkat program (McGhee, 2005). Audit yang dilakukan memungkinkan pencapaian tujuan program peningkatan mutu STAI MU. Tujuan audit dinyatakan sebagai peningkatan (kualitas pe-ngajaran), memvalidasi informasi mengenai standar, mengambil tindakan perbaikan, dan mendukung pertanggungjawaban keuangan (McGhee, 2005).

Pelaporan hasil audit merupakan aspek penting akhir dalam hal pencapaian tujuan program penjamin mutu. Hasil penelitian ini yang menunjukkan adanya pelaporan hasil audit dapat dibandingkan dengan hasil penelitian lain tentang pelaporan audit kegiatan pengabdian masyarakat di suatu universitas swasta dengan laporan kegiatan disampaikan ke beberapa instansi terkait, sesuai dengan tugasnya. Kebijakan program pemberdayaan masyarakat di Universitas tersebut dilakukan dalam format program maupun praktik (Gunawan, 2017). Hasil penelitian ini dapat juga digunakan sebagai bahan pertimbangan tentang perlunya mekanisme audit mutu yang berkelanjutan di pendidikan tinggi Indonesia oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Haris, 2013).

D. CAPAIAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM PENJAMIN MUTU LPM

Pelaksanaan program dan kebijakan penjaminan mutu LPM STAI MU memiliki mutu perencanaan yang meningkat, sehingga sesuai dengan kriteria studi evaluasi. Peningkatan mutu program terutama program pendidikan terkait erat dengan mutu perencanaan yang semakin baik (Charles Hoy, 2005). Kaitan dimaksud terutama pada mutu perencanaan program audit internal maupun eksternal yang hasil praktisnya disebarluaskan pada

lembaga secara individu atau menyeluruh (Brown, 2004), (Leahy, Thielsen, Millington, Austin, & Fleming, 2009). Mutu perencanaan program juga terkait dengan kesepakatan antar pihak yang terlibat dalam penyusunan rencana program baik pimpinan, dosen, maupun staf serta berbagai pihak terkait lainnya. Gagasan yang berbeda dari berbagai pihak dimaksud harus diantisipasi terutama kesepakatan tentang berbagai aspek yang menjadi masukan program dan hasilnya (Turner, 2011).

Pelaksanaan program dan kebijakan penjaminan mutu LPM STAI MU telah mencapai mutu capaian mahasiswa, lulusan di dunia kerja, kinerja dosen dan karyawan belum sesuai dengan kriteria evaluasi. Mutu capaian kualitas hasil perkuliahan mahasiswa merupakan salah satu indikator hasil pelaksanaan program dan kebijakan mutu LPM STAI MU. Hal ini ditunjukkan juga telah terakreditasinya prodi yang ada namun belum maksimal. Akreditasi penting untuk reputasi Pendidikan Tinggi dan program studi dimaksud. Akreditasi sebagai cara untuk memberikan jaminan atas layanan dalam hal sistem pendidikan kepada siswa dan masyarakat. Secara keseluruhan, meningkatnya kesadaran akan kualitas di kalangan Perguruan Tinggi dan Pendidikan Tinggi Agama di Indonesia tidak hanya mulai mencapai standar nasional untuk Pendidikan Tinggi, namun juga mulai mengadopsi standar internasional karena diberi kesempatan oleh pemerintah (Syahid, A & Tulung, 2016). Peningkatan capaian mahasiswa menunjukkan bahwa program dan kebijakan mutu berfokus pada mahasiswa sebagai suatu luaran proses (Morley, 2003).

Hasil penelitian ini dikuatkan penelitian terkait yang menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara praktik penjaminan mutu secara keseluruhan dengan kepuasan mahasiswa. Ada hubungan yang kuat antara aspek penjaminan mutu pada desain kurikulum dan kepuasan mahasiswa, pengajaran dan pembelajaran dengan kepuasan mahasiswa, aspek penilaian para mahasiswa (Suprihatin & Yusof, 2015). Hasil penelitian yang berlawanan terkait capaian mutu mahasiswa ditinjau dari tujuan program terjadi di Palestina yang terungkap bahwa pembelajaran yang diharapkan dari kurikulum, proses dan praktik pengajaran, serta mekanisme untuk tidak mendukung nilai kemajuan dan pencapaian siswa pada tingkat mutu sebagaimana tujuan program (Bsharat & Rmahi, 2016). Hasil penelitian ini juga dapat dibandingkan dengan keberhasilan program

kuliah sarjana muda pada PT berbasis agama nonmuslim (Kristen) dalam hal menghasilkan lulusan yang berpengalaman (Hanchell, 2014b). Lulusan yang lebih berpengalaman berpeluang besar berhasil dalam memasuki dunia kerja. Dunia kerja bagi lulusan STAI MU adalah sebagai guru atau praktisi ekonomi berbasis syariah.

Sasaran program dan kebijakan mutu salah satunya juga adalah dosen. Tujuan program dimaksud agar mutu atau kinerja dosen meningkat. Peningkatan mutu dosen menunjukkan peningkatan mutu program dan kebijakan mutu LPM. Penelitian di berbagai universitas swasta mengungkapkan bahwa kebijakan perencanaan dan persiapan dosen oleh lembaga pelatihan masih lemah dan kurang memperhatikan aspek penilaian kebutuhan atau pemetaan; Pengembangan kompetensi dosen belum ditangani dengan cukup, mengabaikan kebutuhan mahasiswa; Strategi manajemen peningkatan kompetensi dosen juga belum terkoordinasi dengan baik; Aspek manajemen serta pengembangan profesional dosen terus menerus gagal memberikan dukungan, sehingga mempengaruhi kompetensi dosen (Suhaemi & Aedi, 2015). Hal ini harus diantisipasi dimasa mendatang agar keberhasilan program dan kebijakan penjamin mutu STAI MU lebih meningkat. Kerjasama dengan institusi pendidikan tinggi luar negeri yang terkenal dalam meluncurkan program akademik untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran serta mengenalkan sumber pendidikan luar negeri yang sangat baik ke institusi lokal perlu dipertimbangkan (Bigalke & Neubauer, 2009). Kinerja staf atau karyawan STAI MU meningkat menunjukkan peningkatan mutu dan program kerja LPM. Kayode et, al menyatakan bahwa pencapaian kualitas yang diupayakan menuntut manajemen dan staf di semua tingkat harus memikul tanggung jawab dengan ketahanan yang kuat (Kayode, K Bakare &, Hashim, 2014).

Pelaksanaan program kebijakan dan kepemimpinan mutu LPM STAI MU dengan kinerja proses yang meningkat. Kinerja proses meningkat ditunjukkan lembaga STAI yang telah diakreditasi, sesuai hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa ditinjau dari segi kualitas kebijakan, kapasitas organisasi, proses implementasi dan dampak penerapan jaminan kualitas internal di dua perguruan tinggi telah menunjukkan bahwa penerapan jaminan kualitas yang efektif, ditandai dengan akreditasi kelembagaan

(Herman, 2015). Peningkatan kinerja proses juga memberikan langkah awal dalam mengembangkan kerangka penjamin mutu yang menyeluruh (Chong & Ho, 2009). Proses akademik melalui kinerja proses penjamin mutu di setiap program studi memiliki kredibilitas dalam memikul tanggungjawabnya, sehingga terkait dengan kualitas perkuliahan seperti yang diungkap pada hasil penelitian PT swasta di Bangladesh (A. Ashraf, Ibrahim, & H.R.Joarder, 2009).

E. KESIMPULAN

Paparan hasil penelitian dan pembahasan untuk setiap tahapan evaluasi *context*, *input*, *process*, dan *product* dengan model CIPP terhadap program kebijakan manajemen mutu dan program kerja LPM di STAI MU Tanjungpinang telah dilakukan. Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertama, Konteks Kebijakan Program Penjamin Mutu LPM

Kebijakan manajemen mutu dan program kerja LPM STAI MU berlandaskan dasar keimanan Islam, perundang-undangan dan peraturan menteri yang merupakan tuntutan peraturan penting, moral, dan professional sesuai dengan kriteria. Landasan hukum dapat digunakan oleh pembuat kebijakan yaitu dosen maupun unsur pimpinan STAI MU untuk lebih meyakini pencapaian tujuan, memastikan hak terkait individu maupun kelompok dan bentuk penataan kerangka kerja untuk meningkatkan kepatuhan sehingga mendukung serta memfokuskan kebijakan program pada pencapaian tujuan.

Kebijakan manajemen mutu dan program kerja LPM STAI MU memuat tujuan dan sasaran yang jelas dan rinci. Kejelasan tujuan dan sasaran merupakan langkah penting dalam pelatihan menurut Benson et al dalam hal mengembangkan misi dan tujuan. Tujuan dan sasaran bermanfaat bagi evaluator kebijakan program dalam membantu peserta dan staf program penjamin mutu STAI MU dalam mendokumentasi dan memantau kemajuan pencapaian tujuan yang berfokus pada kualitas program, melalui kesepakatan kuat antar komponen kampus dalam menghasilkan lulusan yang semakin bermutu.

Tujuan kebijakan dan program penjamin mutu STAI MU untuk menghasilkan lulusan sarjana yang semakin bermutu sesuai program studi

yang ada. Program penjamin mutu STAI MU selain memiliki tujuan, juga menguraikan sasaran yang jelas dan konsisten. Hal ini menunjukkan program dapat diimplementasikan secara efektif. Efektivitas implementasi yang dapat dilakukan oleh pelaksana dan penentu kebijakan program penjamin mutu serta berbagai aspek pendukungnya.

2. Kedua, Masukan Program Penjaminan Mutu LPM STAI MU

Masukan sarana prasarana program penjamin mutu LPM STAI MU memenuhi standar pendirian perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi Islam Swasta dalam lingkup Kopertais, namun belum memenuhi kriteria evaluasi dalam hal keidealan. Sarana dan prasarana merupakan kebutuhan dasar dan dapat memenuhi standar. Anggaran dalam kebijakan penjamin mutu LPM STAI MU mencukupi terkait dengan monitoring yang baik berdasarkan kebutuhan lembaga tanpa prinsip mengurangi biaya mahal sekaligus mempertahankan hasil maksimal.

Pimpinan, dosen, dan staf sebagai masukan program penjamin mutu STAI MU telah memadai, sangat mendukung, dan berperan sentral dalam pencapaian mutu yang direncanakan sesuai dengan kriteria evaluasi. Pimpinan STAI MU mendukung program dari sisi manajerial dalam bentuk sumberdaya yang berkesinambungan untuk mengatasi ketidaksesuaian antara tujuan dan capaian perencanaan mutu.

Kesepakatan terbentuk antar pimpinan, dosen, dan staf serta pemangku kepentingan lain di STAI MU mengenai tujuan program dan masukan, aktivitas, dan proses yang akan digunakan untuk mencapai tujuan melalui perencanaan strategis dengan mekanisme konsultasi.

Dosen dalam kerangka penerapan kebijakan program manajemen mutu STAI MU sebagai masukan program penjamin mutu dengan posisi sentral. Dosen sangat mendukung dalam keberhasilan pencapaian program penjamin mutu suatu pendidikan tinggi. Jumlah dan kualitas dosen di STAI MU telah memadai dan dengan fasilitas dan kondisi kerja yang terus diupayakan peningkatan mutunya terutama keterampilan mengajar dan meneliti sehingga kreatif, inovatif.

Staf beserta dosen dan pimpinan perguruan tinggi STAI MU secara bersama membuat kesepakatan terkait program penjamin mutu. Staf akademik mendukung perencanaan, pengembangan, peninjauan ulang

dan evaluasi proses perkuliahan yang efektif untuk tujuan pencapaian mutu sebagai pendamping dalam pengabdian masyarakat.

Manajemen staf dalam kerangka masukan program penjamin mutu, pimpinan STAI terutama pimpinan LPM meninjau pengembangan dan tanggapan staf agar memiliki kepuasan dalam bertugas dengan faktor utama yaitu keamanan kerja. Pengembangan staf dan beban kerja staf program penjamin mutu STAI MU telah optimal sehingga dapat meningkatkan kemajuan lembaga. Komitmen staf terus ditingkatkan dalam upaya untuk keberhasilan melalui penerapan pengelolaan sumber daya staf dengan proses seleksi, penilaian kinerja yang netral, penghargaan dan tunjangan, kesempatan pengembangan, pelatihan dan pengembangan karir, serta keamanan kerja.

3. Ketiga, Proses Pelaksanaan Program Penjamin Mutu LPM

Program kerja penjamin mutu LPM STAI MU dilaksanakan dengan perencanaan yang matang, terkoordinasi, dimonitoring dan diaudit secara internal serta eksternal, serta dilakukan pelaporan pelaksanaannya sesuai dengan kriteria. Perencanaan strategis mencakup konsultasi secara luas antara pimpinan dan staf, pihak yang menentukan alokasi sumber daya yang dibutuhkan, pembuat keputusan atau kebijakan yang mempengaruhi lembaga atau program, serta berbagai komponen kunci lainnya.

Perencanaan program penjamin mutu di STAI MU cukup baik. Kualitas perencanaan dalam hal program persiapan dosen, terungkap bahwa kebijakan perencanaan dan persiapan dosen STAI MU dalam hal pelatihan masih lemah dan kurang memperhatikan aspek penilaian kebutuhan atau pemetaan.

Monitoring dan audit dilakukan secara internal dan eksternal, serta pelaporan pelaksanaannya sesuai dengan kriteria evaluasi. Perubahan dari pengendalian mutu hingga penjaminan dan peningkatan mutu dapat terlihat dari perubahan pengaturan secara formal. Pengendalian menyiratkan pemeriksaan pada akhir tujuan, kepastian pencapaian tujuan mutu melibatkan mekanisme audit dan sistem manajemen mutu yang melekat pada setiap tahapan proses program dalam mencapai tujuan. Tujuannya dimaksud adalah dalam rangka mengungkap menginterogasi mekanisme peraturan yang menjamin dan meningkatkan mutu. Audit

penjamin mutu berfokus pada sistem penjaminan mutu organisasi, tujuan dan sasarannya. Proses audit kelembagaan menggabungkan pengawasan sistem penjamin mutu internal maupun secara eksternal pada tingkat lembaga dengan penyelidikan tentang bagaimana sistem tersebut terlaksana hingga tingkat program. Audit yang dilakukan memungkinkan pencapaian tujuan program peningkatan mutu STAI MU.

Pelaporan hasil audit berperan penting dalam pencapaian tujuan program penjamin mutu STAI MU. Hasil penelitian menunjukkan adanya pelaporan hasil audit dengan laporan kegiatan disampaikan ke beberapa instansi terkait, sesuai dengan tugasnya. Kebijakan program pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam format program maupun praktik. Hasil penelitian juga menunjukkan perlunya mekanisme audit mutu yang berkelanjutan.

4. Keempat, Hasil Pelaksanaan Program Penjamin Mutu LPM

Pelaksanaan program pemjaminan mutu LPM STAI MU dengan mutu perencanaan yang meningkat sesuai dengan kriteria evaluasi. Peningkatan mutu pelaksanaan diiringi dengan mutu perencanaan yang semakin baik. Pelaksanaan program pemjaminan mutu LPM STAI MU telah mencapai mutu capaian mahasiswa, dunia kerja, dosen, dan karyawan yang meningkat.

Pelaksanaan program pemjaminan mutu LPM STAI MU dengan kinerja proses yang meningkat juga sesuai dengan kriteria evaluasi. Mutu capaian kualitas hasil perkuliahan mahasiswa merupakan salah satu indikator hasil pelaksanaan program dan kebijakan mutu LPM STAI MU. Hal ini ditunjukkan juga telah terakreditasinya prodi yang ada. Peningkatan capaian mahasiswa maupun lulusan yang memasuki dunia kerja menunjukkan bahwa program dan kebijakan mutu berfokus pada mahasiswa sebagai suatu luaran proses berhasil dalam mencapai tujuannya. Lulusan STAI MU berpengalaman dan telah banyak berhasil memasuki dunia kerja. Dunia kerja bagi lulusan STAI MU adalah sebagai guru atau praktisi ekonomi berbasis syariah.

Peningkatan mutu dosen menunjukkan peningkatan mutu program dan kebijakan mutu LPM. Pengembangan kompetensi dosen di STAI MU belum ditangani dengan cukup, mengabaikan kebutuhan mahasiswa;

Strategi manajemen peningkatan kompetensi dosen juga belum terkoordinasi dengan baik; Aspek manajemen serta pengembangan profesional dosen terus menerus masih gagal memberikan dukungan, sehingga mempengaruhi kompetensi dosen. Hal ini harus diantisipasi dimasa mendatang agar keberhasilan program dan kebijakan penjamin mutu STAI MU lebih meningkat.

Kinerja staf atau karyawan STAI MU meningkat menunjukkan peningkatan mutu dan program kerja LPM. Pencapaian kualitas yang diupayakan menuntut manajemen dan staf di semua tingkat memikul tanggung jawab dengan upaya yang serius.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ashraf, M., Ibrahim, Y., & H.R.Joarder, M. (2009). *Quality Education Management At Private Universities in Bangladesh : an Exploratory Study*. *Jurnal Pendidik Dan Pendidikan*, 24(January), 17–32. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/242100191%0AQUALITY>.
- Amanchukwu, R. N., Stanley, G. J., Ololube, N. P., Amanchukwu, R. N., Stanley, G. J., & Ololube, N. P. (2015). A Review of Leadership Theories, Principles and Styles and Their Relevance to Educational Management. *Management*, 5(1), 6–14.
- Arikunto, Suharsimi dan Abdul Jabar, C. S. (2009). *Evaluasi Program Pendidikan, Pedoman Teoritis bagi Mahasiswadan Praktisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, S. dan C. S. (2007). *Evaluasi Program Pendidikan, Pedoman Teoritis Praktis Bagi Praktisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Asian Development Bank. (2012). *Private Higher Education Across Asia: Expanding Access, Searching for Quality*. Philippines: Asian Development Bank.
- Asmawi, M. R. (2018). Strategi Meningkatkan Lulusan Bermutu Di Perguruan Tinggi. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 9(2), 66. <https://doi.org/10.7454/mssh.v9i2.124>.
- Benson, A., Hinn, D. M., & Lloyd, C. (2001). *Advances In Program Evaluation Volume 7: Visions Of Quality: How Evaluators Define, Understand And Represent Program Quality*. Amsterdam: JAI.
- Bigalke, T. W., & Neubauer, D. E. (2009). *Quality and the Public Good: An Inseparable Linkage. Higher Education in Asia/Pacific*. New York: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9780230100466_1.
- Brown, R. (2004). *Quality Assurance in Higher Education The UK Experience Since 1992*. London: Routledge Falmer.
- Bsharat, A., & Rmahi, R. '. (2016). Quality Assurance in Palestine's Teacher Education Programs: Lessons for Faculty and Program Leadership. *American Journal of Educational Research*, 4(4), 30–36. <https://doi.org/10.12691/education-4-2A-5>.
- Charles Hoy, C. B.-J. and M. W. (2005). *Improving Quality in Education*.

London and New York: Palmer Press.

- Chong, S., & Ho, P. (2009). *Quality teaching and learning: a quality assurance framework for initial teacher preparation programmes. International Journal of Management in Education*, 3(3/4), 302. <https://doi.org/10.1504/ijmie.2009.027352>.
- Coryn, S. and. (2014). *Evaluation Theory, Models, & Application – Second Edition*. San Francisco: A Wiley Brand.
- Crawford, J. E. (2005). *Evaluation of Libraries and Information Services*. London: Aslib the association for information management and information management international.
- Davis, G. and. (1997). *Total Quality*. New Jersey: Viacom Company.
- Depdiknas. Undang-Undang Ri Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Indonesia, Pub. L. No. 20, Departemen Pendidikan Nasional 1 (2003). Jakarta: UU. Retrieved from http://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/08/UU_no_20_th_2003.pdf.
- Doherty, D. G. (1994). *Developing quality systems in education*. London: Routledge.
- Dronkers, J. (2010). *Quality and Inequality of Education_ Cross - Jaap Dronkers*.
- Edward, S. (2005). *Total Quality Management In Education*. London: Kogan Page Limited.
- Feigenbaum. (1991). *Total Quality Control*. Singapore: McGraw-Hill Book Co.
- Fitri, A. Z. (2016). *Quality Assurance System Between the Islamic State University and the State University. Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2), 208. <https://doi.org/10.15575/jpi.v2i2.787>.
- Gaspersz, V. (2011). *Total Quality Management*. Jakarta: PT. Penebar Swadaya.
- Guessoum, N., & Osama, A. (2015). Institutions: Revive universities of the Muslim world. *Nature*, 526(7575), 634–636. <https://doi.org/10.1038/526634a>
- Gunawan, A. (2017). Management of Community Service of Islamic Universities At Banten. *International Journal of Research - Granthaalayah*2, 5(4), 352–368.

- Hanchell, V. F. (2014a). *A Program Evaluation of a Christian College Baccalaureate Program Utilizing Stufflebeam's CIPP Model*. ProQuest Dissertations and Theses. USA: Gardner-Webb University. Retrieved from http://ezproxy.lib.uwstout.edu/login?url=http://search.proquest.com/docview/1648415930?accountid=9255%5Cnhttp://uw-primo.hosted.exlibrisgroup.com/openurl/STOUT/stout_services_page??url_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&genre=di.
- Hanchell, V. F. (2014b). *A Program Evaluation of a Christian College Baccalaureate Program Utilizing Stufflebeam's CIPP Model*. ProQuest Dissertations and Theses. USA: Gardner-Webb University. Retrieved from http://ezproxy.lib.uwstout.edu/login?url=http://search.proquest.com/docview/1648415930?accountid=9255%5Cnhttp://uw-primo.hosted.exlibrisgroup.com/openurl/STOUT/stout_services_page??url_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&genre=diss.
- Haris, I. (2013). Assessment on the implementation of internal *quality assurance* at higher education (an Indonesian report). *Journal of Education And Instructional Studies in the World*, 3(4), 41–49.
- Harris, N. (2007). *Education, Law and Diversity*, Oxford And Portland, (Oregon: Hart Publishing).
- Hasan, H. (2009). *Evaluasi Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Haseena, V.A; Mohammed, P. (2015). Aspects of *Quality* in Education for the Improvement of Educational Scenario. *Journal of Education and Practice*, 6(4). Retrieved from <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1083740.pdf>.
- Heather Fry, Hethaer., Ketteridge, Steve., Marshall, S. (2009). *A Handbook for Teaching and Learning in Higher Education Enhancing Academic Practice, Third edition*. New York: Routledge.
- Herman, M. (2015). Implementation of Internal *Quality Assurance* Private Higher Education (PTS) (A Case Study in the Islamic University of Indonesia and Muhammadiyah University of Yogyakarta). *International Journal of Science and Research (IJSR)*, 4(2), 1907–1911. Retrieved from <https://www.ijsr.net/archive/v4i2/SUB151539.pdf>.
- Jack R. Fraenkel, & N. E. W. (2009). *How to design and evaluate research in*

- education. 7th ed.* New York: McGraw-Hill Companies, Inc.
- Jan Kohoutek. (2009). *Implementation of Standards and guidelines for Quality Assurance in Higher Education*. Cepes. Bucharest: Unesco. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Jin, Y. (2014). Educational administration management system and modern education management on the perspective of modern information technology. *Information Technology Journal*, 13(2), 340–346. <https://doi.org/10.3923/itj,2014.340.346>.
- Jones, C. O. (1996). *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Juran, J. M., Godfrey, A. B., Hoogstoel, R. E., & Schilling, E. G. (1998). *Juran's Quality Handbook*. McGrawHill. San Francisco: San Fransisco Washington DC. <https://doi.org/10.1108/09684879310045286>.
- Kayode, K Bakare &, Hashim, N. C. (2014). *Quality Assurance in Contemporary Islamic Universities: Issues and Challenges*. *IJUM Journal of Educational Studies*, 2(2), 40–58.
- Kazeem, B., & Hashim, C. N. (2019). *Quality Assurance in Contemporary Islamic Universities: Issues and Challenges*. *IJUM Journal of Educational Studies*, 2(2), 40–58. <https://doi.org/10.31436/ijes.v2i2.47>.
- Kemendiknas. Permendiknas No 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, Pub. L. No. 63 (2009). Jakarta: Permendiknas RI. Retrieved from ???
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2015). *Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*. Jakarta: Kemendikbud. Retrieved from <http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/RenstraKemdikbud2015-2019.pdf>.
- Khandker, R. Shahidur., Koolwal, B. Gayatri., Samad, A. H. (2010). *Handbook on Impact Evaluation: Quantitative Methods and Practices*. Washington: The World Bank.
- Khoiri, M., Tinggi, S., & Nuklir-Batan, T. (2009). Upaya Peningkatan Mutu Lulusan Perguruan Tinggi Untuk Memenuhi Kebutuhan Sdm Industri Dengan Pendekatan Tqme (p. 38).
- Kohoutek, J. (2009). *Implementation of the Standards and Guidelines for Quality Assurance in Higher Education in the Central and East-*

- European Countries* – Agenda Ahead, Bucharest: Unesco.
- Korten, D. C., & Syahrir, C. (1988). *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Leahy, M. J., Thielsen, V. A., Millington, M. J., Austin, B., & Fleming, A. (2009). Quality assurance and program evaluation: Terms, models, and applications. *Journal of Rehabilitation Administration*, 33(2), 69–82. Retrieved from https://digitalcommons.usu.edu/sped_facpub
- Lexy, J. M. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- McGhee, P. (2005). *The Academic Quality Handbook: Enhancing Higher Education in Universities and Further Education Colleges*. London: Kogan Page.
- Mertens, D. M. (2010). *Research and evaluation in education and psychology: integrating diversity with quantitative, qualitative, and mixed methods. 3rd ed.* California: SAGE Publications, Inc.
- Mohammad Abdul Wahid Usmani, Suraiya Khatoon, Marwan M. Shammot, & Ahmad M. Zamil. (2012). Meta Evaluation of a Teachers ' Evaluation Programme Using CIPP Model. *International Conference on Quality, Lahor, Pakistan*, 65(7), 230–252.
- Mohsin, N. Mohammad., Khan, M. Tariq., Awan, S. Ahmed., Doger, H. A. (2011). Human Resource Management: Comparative Study Between Public And Private Universities In Austria. *International Journal of Humanities and Social Science*, 1(12), 263–271.
- Morley, L. (2003). *Quality and Power in Higher Education*. Philadelphia: Open University Press.
- Mulyasa. (2001). *Manajemen Berbasis Madrasah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nik Mutasim Nik Ab. Rahman, Mohamad Adnan Alias, Sharmin Shahid, Mohamad Abdul Hamid, & Syed Shah Alam. (2013). Relationship between islamic human resources management (IHRM) practices and trust: An empirical study. *Journal of Industrial Engineering and Management*, 6(4), 1105. <https://doi.org/10.3926/jiem.794>.
- Nyenya, T & Gabi, B. (2016). The Impact of the Quality Assurance Unit on Quality Improvement in Zimbabwe Open University. *International Journal of Humanities, Social Sciences and Education*, 3(2).

- <https://doi.org/10.20431/2349-0381.0302011>.
- Nyre, Glenn F. and Rose, C. (1979). The Practice of Evaluation. POD Quarterly. *Journal of the Professional and Organizational Development Network in Higher Education*, 1(3), 192–193.
- Patton, M. Q. (1982). *Qualitative Evaluation Methods*. Beverly Hills: Sage Publications.
- Pekar, P. J. (1995). *Total Quality Management: Guiding Principles for Application*. Philadelphia: ASTM.
- Peng, S. S., & Li, Z. (2009). *Educational evaluation in East Asia emerging issues and challenges*. New York: Nova Science Publishers, Inc. Retrieved from <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=333588>.
- Postlethwaite, T. N. (2005). *Educational research: some basic concepts and terminology*. UNESCO International Institute for Educational Planning. Paris: International Institute for Educational Planning/UNESCO. Retrieved from http://www.iiep.unesco.org/fileadmin/user_upload/Cap_Dev_Training/Training_Materials/Quality/Qu_Mod1.pdf.
- PP RI Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional Pendidikan (SNP), Pasal 19 ayat 3, Diundangkan di Jakarta. Tanggal 16 Mei 2005. Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia.
- Pudji, D. dan M. (2008). *Pengukuran dalam Bidang Pendidikan*. Jakarta: Grasindo.
- Royce Sadler, D. (2014). Assessment, evaluation and *quality* assurance: Implications for integrity in reporting academic achievement in higher education. *Education Inquiry*, 3(2), 201–216. <https://doi.org/10.3402/edui.v3i2.22028>.
- Russo, C. J. (2013). *Encyclopedia of law and higher education*. *Choice Reviews Online* (Vol. 48). SAGE Publications, Inc: Los Angeles. <https://doi.org/10.5860/choice.48-0044>.
- Scott, D & Usher, R. (2011). *Researching education: data, methods and theory in educational enquiry– 2nd ed*. London: Continuum International Publishing Group.
- Spradley, J.. (1980). *Participant Observation*. New York: Holt Rinerhart and

Winston.

- Stavropoulou, A., & Stroubouki, T. (2014). Evaluation of educational programmes - The contribution of history to modern evaluation thinking. *Health Science Journal*, 8(2), 193–204.
- Suarez, G. (2000). *Three Experts on Quality Management*. Arlington: Departement of Navy.
- Sugiyono. (2008). *Kalitatif; Metode Penelitian kuantitatif; dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhaemi, M. E., & Aedi, N. (2015). A Management Strategy for the Improvement of Private Universities Lecturers' Professional Competences. *International Education Studies*, 8(12), 241. <https://doi.org/10.5539/ies.v8n12p241>.
- Suharsimi Arikunto. (2010). *Evaluasi Program Pendidikan Pedoman Teoretis praktis bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suprihatin, K., & Yusof, H. A. R. B. M. (2015). Development Design Model of Academic Quality Assurance at Private Islamic University Jakarta Indonesia. *Higher Education Studies*, 5(4). <https://doi.org/10.5539/hes.v5n4p6>.
- Syahid, A & Tulung, M. J. (2016). Quality Assurance and Accreditation in Religious Higher Education: Indonesian Cases. *International Journal of Humanities and Social Science Invention*, 5(10), 52–67.
- Tayib Nafis. (2008). *Evaluasi Program dan Innstrumen Evaluasi untuk Program Pendidikan dan Pelatihan*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Tayipnapis, F.. (2008). *Evaluasi Program*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Turner, A. D. (2011). *Quality in Higher Education*. Taipei: Sense Publisher.
- Vincent K. Omachonu, Ph.D, Joel E. Rps, P. D. (2005). *Principles Total Quality*. New York: CRC Press.
- Welch, A. (2012). Seek knowledge throughout the world? Mobility in islamic higher education. *Research in Comparative and International Education*, 7(1), 70–80. <https://doi.org/10.2304/rcie.2012.7.1.70>.
- Wholey, J. S., Hatry, H. P., & Newcomer, K. E. (2010). *Handbook of Practical Program Evalaution*. San Francisco: John Wiley & Sons, In.
- Widayoko, E. P. (2009). *Evaluasi Pembelajaran Panduan Praktis Bagi Pendidik dan Calon Pendidik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Wildschut, L. P. (2014). *Theory-based evaluation, logic modelling and the experience of SA non-governmental organisations*. Stellenbosch University.
- Yin, K. R. (2011). *Qualitative Research from start to finish*. New York: The Guilford Press.

PROFIL PENULIS

Syamsul Bahri



Syamsul Bahri, dilahirkan pada 27 Juli 1964, di Kijang Kecamatan Bintaan Timur Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau. Dia adalah putra kedua dari enam bersaudara, dari pasangan ibu Mardiah (Almarhumah) dan Bapak Sobri (Almarhum) yang semasa hidupnya berprofesi sebagai nelayan.

Pendidikan diawali dari lulusan SDN Pelud Kijang (1979), MTsN Tnjungpinang (1982), dan PGAN Tanjungpinang (1985), serta memperoleh gelar sarjana pada IAIN SUSQA Pekan baru (Riau) pada tahun 1990 dan Master Pendidikan Pengembangan Kurikulum di UPI (Universitas Pendidikan Indonesia) Bandung (Jawa Barat) pada tahun 2008. Sejak tahun 2013 memperoleh kesempatan untuk melanjutkan pendidikan pada program Pascasarjana di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) di Jakarta. Perjalanan karir kepegawaiannya dimulai sejak akhir tahun 1994 yaitu menjadi guru Agama Islam di SMA Negeri 1 Moro. Sebelumnya sebagai dosen STIT Bengkalis dan Kepala Aliah Swasta Bengkalis. Pada tahun 2000 mengajar di SMA Negeri 2 Tanjungpinang, disamping sebagai dosen STAI Tanjungpinang. Dan jabatan terakhir sebelum melanjutkan pendidikan pada program Pascasarjana UPI Bandung, adalah sebagai Waka Kesiswaan (2003-2006). Pada bulan Agustus 2006 terpilih sebagai Guru Teladan/Berprestasi tingkat Nasional dan diberikan penghargaan oleh Menteri Pendidikan dan Bapak Presiden RI. Kemudian terhitung tanggal 8 Mei 2008 dilantik oleh Wali Kota Tanjungpinang sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Tanjungpinang.

Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd

Dosen tetap, Guru besar Universitas Negeri Jakarta, Aktif mengajar, jabatan yang pernah di emban menjadi Rektor 2 Periode Universitas Negeri Jakarta, Ketua ISMAPI serta banyak lagi jabatan baik di pemerintahan maupun di dunia pendidikan

Prof. Dr. R. Madhakomala, M.Pd

Dosen tetap, Guru besar Universitas Negeri Jakarta, Aktif mengajar, jabatan yang pernah di emban menjadi koordinator program studi S3 di Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, sebagai riviewer journal nasional dan internasional, menerima penghargaan s Satyalancana Karya Satya dari Presiden tahun 2007, 2008, 2009, 2017

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM AKREDITASI SEKOLAH/ MADRASAH



Dewi Astenia adalah anak ke empat dari tujuh bersaudara dari pasangan bapak (almarhum Letkol purnawirawan) Haji Jenahar dan Ibu Hj Irma. Lahir di Palembang 24 Mei 1961, Program S1 ke Universitas Sriwijaya (UNSRI) Palembang jurusan Pendidikan Luar Sekolah lulus tahun 1985. Menempuh Pendidikan Magister (S2) di Western Washington University di USA lulus tahun 1989. Pada tahun akademik 2014/2015 melanjutkan Program Doktor (S3) Di Program Studi Manajemen Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta. Sejak tahun 1986 sampai saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan sebagai staf pada Bidang Pendidikan Tenaga Kependidikan. Tenaga pengajar di Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia (UPGRI) Palembang. Kegiatan Organisasi yang diikuti sebagai Wakil Ketua FKPPi Pengurus Daerah 1V Provinsi Sumatera Selatan, Anggota Badan Akreditasi Provinsi PAUD/PNF pada Komisi Renbang Provinsi Sumatera Selatan, Ketua Koperasi Handayani Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Pengalaman Pekerjaan Kedinasan sebagai Kasi Pelaksanaan dan Program Evaluasi pada BP3NFI Provinsi Sumatera Selatan tahun 2008-2012, Kasi Pembinaan Kesenian dan Budaya pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2007-2008, Kasi Sejarah dan Purbakala pada Kantor Wilayah Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tahun 1996-2001 dan Sekretaris Korpri Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan tahun 1994-1998. Pengalaman Pekerjaan Tenaga Pengelola/Pengajar di Universitas PGRI Palembang, Kasubag Tata Usaha Penelitian dan Pengembangan Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Palembang tahun 1992-1994, Pembantu Dekan II pada Fakultas Perikanan Universitas PGRI Palembang tahun 2000-2003, Wakil Dekan III pada Fakultas Perikanan Universitas PGRI Palembang tahun 2003-2007, Pembantu Dekan II pada Fakultas Perikanan tahun 2007-2011, Wakil

ISBN 978-623-6608-00-5



9 786236 608005